



Laporan Kinerja

Direktorat Pelaporan Dan Statistik

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2021. Lakip Direktorat Pelaporan dan Statistik ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik.

Penyusunan Lakip Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Lakip ini juga mengacu pula pada Surat Sekretaris Utama Nomor: 2868/RC.01/B1/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2021 pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Kami menya dari bahwa dalam penyusunan Lakip Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2021 ini masih terdapat beberapa kekurangan maka kami mengharapkan adanya saran yang membangun dalam upaya perbaikan penyusunan Lakip Direktorat Pelaporan dan Statistik kedepannya. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Lakip ini.

Akhir kata, kami berharap semoga dengan adanya Lakip Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2021 ini menjadi bukti nyata kinerja yang efektif dan efisien dari seluruh jajaran Direktorat Pelaporan dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik dan benar.

“
**Keberhasilan
Pendataan Keluarga 2021
Merupakan Pencapaian Yang
Luar Biasa**

Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik,
Lina Widyastuti, SKM, MAPS



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaporan dan Statistik (Ditlaptik) merupakan salah satu komponen di Kedeputusan Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN). Peranan Ditlaptik dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya yang meliputi kegiatan pokok pengumpulan, pengolahan, analisis, dan evaluasi. Dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan evaluasi dalam bidang data, Direktorat Pelaporan dan Statistik memiliki tugas subsistem pencatatan dan pelaporan, yaitu subsistem pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Lapangan, dan Pendataan Keluargabeserta Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI). Padatahun 2021 ini, ketiga sub sistem tersebut telah mampu menyediakan data dan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan terpercaya yang tentunya berbasis Teknologi Informasi (IT), sehingga hal ini dapat dijadikan alat pengendalian pencapaian Program Bangga Kencana yang dilakukan oleh BKKBN. Selain itu, ketiga sub sistem tersebut juga bisa dijadikan dasar dalam upaya peningkatan peranserta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam bekerja menjalankan Program Bangga Kencana di lapangan, tentunya dengan menggunakan data dan informasi tentang Program Bangga Kencana yang tersedia di seluruh tingkatan wilayah.

Dari pengukuran capaian kinerja tahun 2021, dapat dikatakan bahwa hampir semua sasaran kegiatan “Mewujudkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik yang Berkualitas dan Terintegrasi” berhasil dicapai, kecuali indeks kualitas data. Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Tahun 2021 sebesar 100%, tetapi untuk Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana capaiannya 99,19%. Sebagai catatan bahwa sebuah indikator dikatakan “berhasil” jika capaian $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Dukungan anggaran yang berasal dari DIPA tahun 2021 dalam upaya penyelenggaraan capaian kinerja Direktorat Pelaporan dan Statistik sebesar Rp. 2.511.120.000,-. Dari dana tersebut kemudian dapat direalisasikan sebanyak Rp. 2.488.621.917 (99,10%). Dengan mencermati realisasi anggaran tahun 2021 tersebut, realisasi kinerja mencapai 100% pada rata-rata seluruh indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja DITLAPTIK tahun 2021.

Pada tahun 2021, Direktorat Pelaporan dan Statistik telah bekerja sama dengan pemangku kebijakan dan mitra kerjadalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana serta berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengelola data dan informasi Program Bangga Kencana, baik itu tenaga pengelola data dan informasi yang berada di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat Pusat agar data yang dihasilkan berkualitas

Pendataan Keluarga 2021

Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Mandat dan Peran Strategis.....	7
D. Program Reformasi Birokrasi.....	8
E. Permasalahan, Tantangan dan Peluang.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	12
B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021.....	13
C. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2022	15
D. Perjanjian Kinerja.....	17
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja.....	25
Analisis Keberhasilan.....	34
Analisis Kegagalan.....	46
Solusi.....	47
B. Realisasi Anggaran.....	54
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	55
D. Evaluasi Kinerja.....	61
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rekomendasi.....	64

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diamanatkan untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

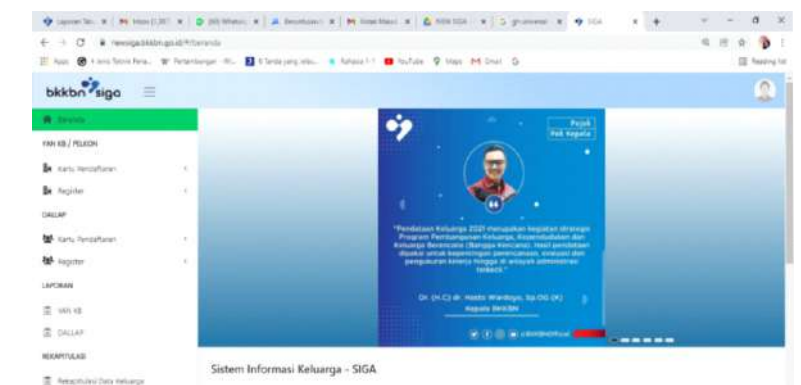
Pada akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi "Bangga Kencana".

“
Melalui sebutan baru
tersebut (Bangga Kencana),
menunjukkan bahwa
BKKBN merupakan
lembaga yang mampu
memberikan manfaat
kepada seluruh keluarga
Indonesia agar terwujudnya
keluarga berkualitas
yaitu keluarga yang tentram,
mandiri dan bahagia

Dalam undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga

Dimana dalam Peraturan dan undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga diperlukan data dan informasi keluarga yang dikelola melalui "New Sistem Informasi Keluarga".



Dalam era sekarang ini, Program Bangga Kencana masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dimana BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” berperan pada 3 Program Prioritas (PP)
- PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”

Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2020–2024 salah satunya difokuskan kepada “Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu”. Sebagai Unit Kerja yang berperan pada penyediaan data dan informasi program bangga kencana yang berkualitas, terkini, serta dapat dipertanggung jawabkan, saat ini

“

Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) telah mampu menyediakan data dan informasi Program Bangga Kencana secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat yang berbasis teknologi Informasi

Hasil pencatatan dan pelaporan data dan informasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengendalian pencapaian sasaran Program Bangga Kencana di setiap tingkatan wilayah

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Yang kemudian diturunkan dalam Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 21/RC.01/B1/2021 tanggal 7 Januari 2021, maka disusunlah :

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DITLAPTIK Tahun 2021 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja”

Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dimaksudkan sebagai penggambaran prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas :

“

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai fungsi:

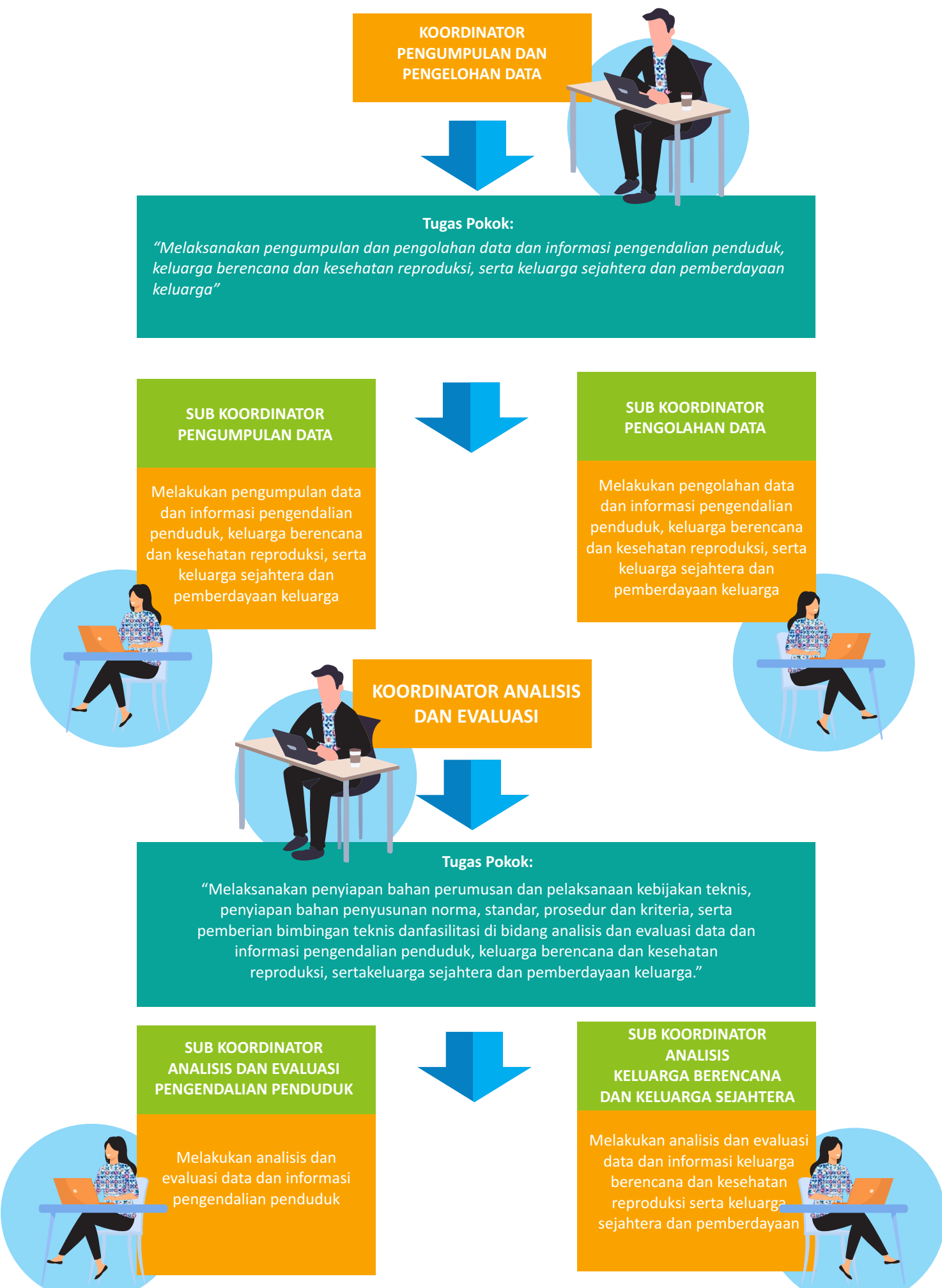
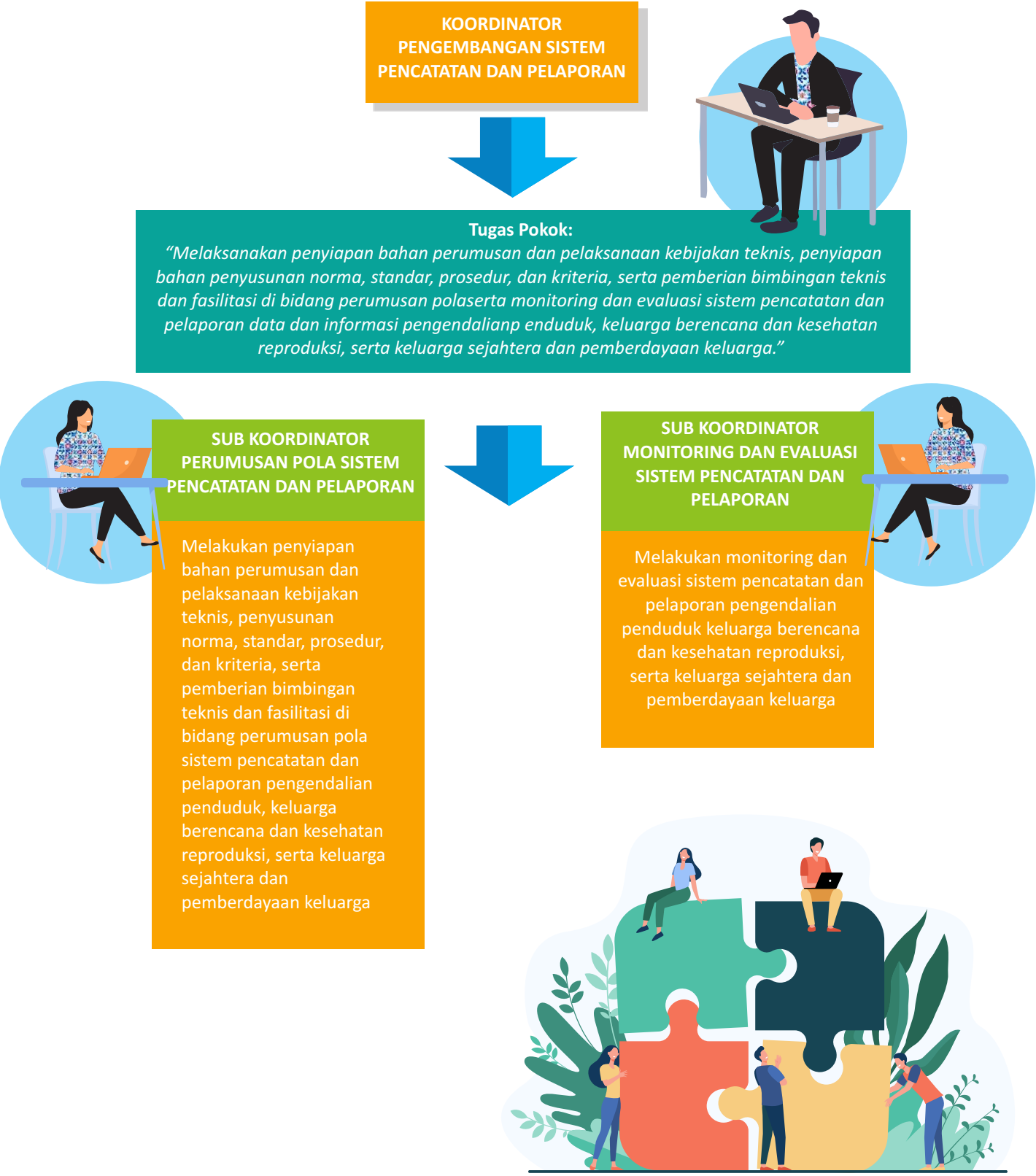


Struktur Direktorat Pelaporan dan Statistik terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pelaporan dan Statistik didukung oleh 3 (tiga) Koordinator antara lain :

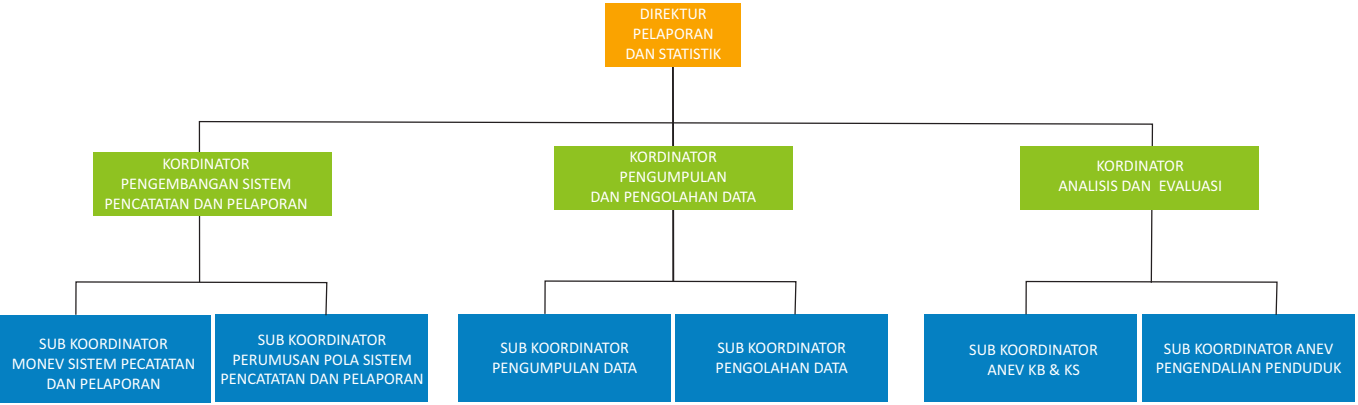
- a. Koordinator Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan;
- b. Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- c. Koordinator Analisis dan Evaluasi;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penugasan Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam Pelaksanaan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka tugas pokok dari masing-masing Koordinator sebagai berikut:

Tugas pokok dari masing-masing Koordinator sebagai berikut:

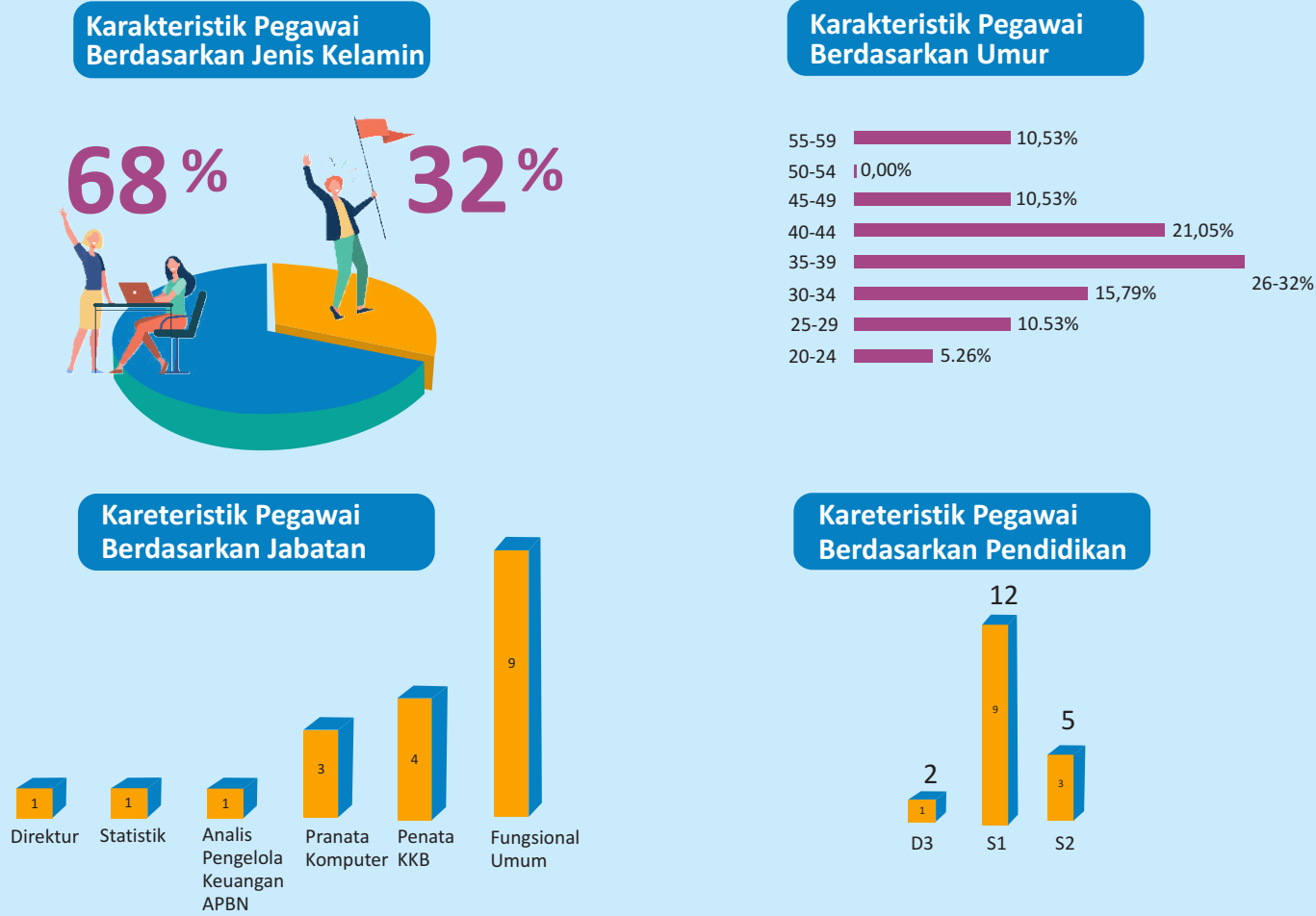


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Direktorat Pelaporan dan Statistik



Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerjanya, Direktorat Pelaporan dan Statistik didukung oleh 19 orang pegawai dengan karakteristik sebagai

Gambar 1.2
Distribusi Pegawai Direktorat Pelaporan dan Statistik Menurut Karakteristik Demografi



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai di Direktorat Pelaporan dan Statistik lebih banyak wanita dari pada pria (68% berbanding 32%), berdasarkan umur sebagian besar berumur 35 – 39 tahun (26,32%), berdasarkan Jabatan paling banyak yaitu fungsional umum sebanyak 9 orang, dan berdasarkan pendidikan hampir sebagian besar berpendidikan S1 (12 orang)

“
Secara kuantitas, jumlah pegawai DITLAPTIK dengan beban kerja yang ada kurang memadai
”

Untuk menunjang profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, beberapa SDM Direktorat Pelaporan dan Statistik telah mengikuti Pelatihan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pelatihan yang diikuti oleh SDM Ditlaptik Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Learning Essentials Data Visualization	3 orang Ditlaptik
2.	e- learning <i>Dashboard</i> indikator operasional dengan JHCCP	10 orang Ditlaptik
3.	TOT Demografi	1 orang Ditlaptik
4.	<i>MOT Refreshing</i> PK21	5 orang Ditlaptik
5.	<i>MOT Refreshing</i> SIRIKA	2 orang Ditlaptik
6.	MOT Pelayanan Kontrasepsi pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana	1 orang Ditlaptik
7.	MOT Tim Pendamping Keluarga	1 orang Ditlaptik
8.	Pelatihan Dasar CPNS	1 orang Ditlaptik

Mandat Dan Peran Strategis

“
Direktorat Pelaporan dan Statistik berperan pada penyediaan data dan informasi program bangsa kencana yang berkualitas, terkini, serta dapat dipertanggung jawabkan.
”

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /PER/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi Keluarga (SIGA), terdapat beberapa sistem pencatatan dan pelaporan informasi dan data yang bisa dimanfaatkan yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan;
- c. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya

Program Reformasi Birokrasi

“
Melalui SIGA, Data dan Informasi Program Bangga Kencana
Dapat Ditelusuri secara *By Name By Address*”

Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan reformasi birokrasi yang mengacu ke 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi lingkup kedeputan bidang ADPIN dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka:

Direktorat Pelaporan dan Statistik turut serta mendukung pelaksanaan Program RB di lingkungan Kedeputan ADPIN. Adapun pelaksanaan Program RB DITLAPTIK terdapat di 6 (enam) Area dari 8 Area Perubahan



1. Manajemen Perubahan

Melaksanakan dan menerapkan budaya kerja bkkbn di lingkungan direktorat pelaporan dan statistik yang merupakan implementasi budaya kerja dalam berbagai program kegiatan untuk menunjang tupoksi maupun rb dengan tema:

KEREN

Kerja Tuntas

Bertanggung jawab, disiplin, efisien dan efektif, transparan, memberikan hasil terbaik, dapat bekerjasama, tepat waktu dan inovatif dan kreatif;

Responsip

Selalu siap pada saat di butuhkan, memberikan pelayanan terbaik, memiliki komunikasi yang baik, cepat beradaptasi dengan perubahan, dapat

Nilai Luhur

Bersikap empati, dapat menjadi teladan, optimis, berani mengambil tindakan yang benar, memiliki jiwa kepemimpinan, dapat dipercaya, memiliki integritas tinggi, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka penguatan Sistem Kinerja lingkup Direktorat Pelaporan dan Statistik, maka dikembangkan beberapa aplikasi pencatatan dan pelaporan antara lain

- Aplikasi Statistik Rutin
- Aplikasi Pendataan Keluarga
- Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
- Dashboard Sejuta Akseptor Pada Momentum
- Pelayanan KB Sejuta Akseptor Di Hari Keluarga Nasional Ke- 27

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Rapat komponen pembahasan capaian program, kegiatan dan anggaran secara rutin (bulanan) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien dimana semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 telah terdokumentasi dengan rapi pada aplikasi SPIP BKKBN

4. Penguatan Tata Laksana

Pada tahun 2021, Direktorat Pelaporan dan Statistik melakukan perubahan bisnis proses pelaksanaan program dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk buku **panduan-panduan**, antara lain



1. Panduan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ujicoba di Kampung KB Percontohan dan Pre-Implementasi New SIGA 2021



2. Panduan Pengukuran Kualitas Data dan Informasi



3. Buku Panduan Pengolahan Data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022



4. Mekanisme Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB



5. Mekanisme Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan

5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- SOP Pemanfaatan Data Program Bangga Kencana
- Perbaikan Pengelolaan Sistem Data Rutin melalui Pengembangan New Siga
- Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Data Statistik Rutin Melalui Web
- Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Data Statistik Rutin Melalui Web Portal PK21
- Peningkatan Pelayanan kepada Pengelola Data Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Lini Lapangan melalui Pembentukan Tim Helpdesk, Tim Posko PK21 dan Call Center PK21



6.Penataan Manajemen SDMA

- a. Penegakan Displin seperti teguran melalui tulisan dan lisan melalui WA grup dan rekap kehadiran pegawai Ditlaptik
- b. Kinerja Individu? kinerja individu dapat dipantau dan diukur melalui SKP, dan SIVIKA
- c. Pengembangan Kinerja Pegawai ? melalui Training Need Assesment (TNA) terdapat 4 orang atau 25% yang mengalami kesenjangan kompetensi, telah terdapat pegawai yang mengikuti pelatihan dan pengembangan baik eksternal maupun internal
- d. Perencanaan dan Kebutuhan Pegawai ? Melalui ABK masih terdapat kekurangan pegawai fungsional, terdapat pegawai yang lulus mengikuti open biding

Permasalahan, Tantangan, Dan Peluang

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan utama dan tantangan yang menjadi perhatian penting bagi Direktorat Pelaporan dan Statistik, antara lain yaitu :

1. Peningkatan kualitas layanan pemanfaatan data rutin (Pendataan keluarga, Pengendalian lapangan, Pelayanan KB) dan Stunting
2. Perubahan krusial (pelaporan rekapitulasi menjadi by name by address) pada sistem pencatatan dan pelaporan dari SR 13 ke New SIGA membutuhkan masa transisi
3. Integrasi data lintas sektor pelaksana percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen yang tinggi dan tahapan teknis yang intensif
4. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) untuk dapat mengukur secara representatif Indikator capaian
5. Pelaksanaan Program Nasional Pendataan Keluarga pada 1 April sampai 31 Mei 2021 yang kemudian di perpanjang sampai 5 Juli 2021 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lainnya di luar PK yang digeser ke semester II
6. Refocussing TOT New SIGA pada PULAP yang sedianya sebagai persiapan implementasi New SIGA 2022
7. Terbatasnya Sarana Prasarana infrastruktur PK 21

PELUANG

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan tantangan, serta untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program Bangga Kencana melalui pemanfaatan data dan informasi, maka peluang yang dimiliki Direktorat Pelaporan dan Statistik, antara lain yaitu :

a	Amanat perundang-undangan tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga mewajibkan pemerintah daerah dan kabupaten/kota melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang berbasis keluarga (Pendataan Keluarga, Pelayanan Keluarga Berencana serta Pengendalian Lapangan);
b	Mengembangkan aplikasi SIGA pada tahun 2017 dan telah dilakukan pembaharuan pada tahun 2021 berupa aplikasi New SIGA yang dapat mengintegrasikan data Pendataan Keluarga, Pelayanan KB serta Pengendalian Lapangan <i>by name by address</i> , sehingga akan terwujud data dan informasi yang tepat, terkini dan <i>reliable</i> ;
c	Data dan informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh internal BKKBN maupun oleh instansi/sector lain sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah;
d	Dilaksanakannya reviu capaian program setiap bulannya untuk mengevaluasi kinerja baik dari sisi capaian program menggunakan hasil data RR maupun SIGA, beserta anggarannya;
e	Laporan Pro PN program bangga kencana atas capaian target kegiatan dilakukan melalui aplikasi SIGA;
f	Data dan informasi berbasis keluarga hanya dimiliki oleh BKKBN
g	Adanya sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola data dan informasi Program Bangga Kencana di kabupaten/kota.
h	Tersedianya visualisasi <i>dashboard</i> Program Bangga Kencana sampai tingkat Kabupaten/Kota yang terus dikembangkan bersama Jalin <i>Foundation</i> sebagai <i>monitoring</i> pencapaian program

A blurred background image of a business meeting. Several people are seated around a table, with their hands visible. On the table are various documents featuring colorful bar charts and line graphs. A silver pen lies on one of the documents. A glass of water is also visible on the right side of the table. The overall scene suggests a professional discussion or presentation.

Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

Renstra BKKBN 2020–2024 disahkan melalui Peraturan BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2020–2024. Pada Renstra tersebut, BKKBN memperkenalkan ulang (rebranding) program utamanya dengan sebutan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Melalui sebutan baru tersebut, menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang mampu memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia agar terwujudnya keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” berperan pada 3. Program Prioritas (PP):

- Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP yaitu Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;

2. PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” berperan pada PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berakhlak, dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Kedepatan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) berpartisipasi aktif dalam mendukung tercapainya peran-peran di atas. Dengan komposisi unit kerja eselon II yang ada di jajaran Kedepatan Adpin, maka fokus dari dukungan tersebut adalah bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas dan penduduk Tumbuh Seimbang melalui perubahan perilaku masyarakat termasuk stakeholder terhadap program Bangga Kencana. Sebagai bagian dari Unit Kerjadi Lingkungan Kedepatan Bidang Adpin, Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) berperan pada penyediaan data dan informasi program Bangga Kencana yang berkualitas, terkini, serta dapat dipertanggungjawabkan.

DitlapTIK memastikan diperolehnya data dan informasi program Bangga Kencana yang: 1) dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta kualitasnya; 2) sebagai peta kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melakukan KIE dan penggerakan dalam program Bangga Kencana; 3) dapat digunakan sebagai data dasar dalam perencanaan program dan anggaran salah satunya perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 4) dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian kinerja BKKBN, Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan BKKBN, serta; 5) dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk program pembangunan lainnya.

A.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

A.1.1 Tujuan

Secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana guna mendukung tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Program Bangga Kencana.

Tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pengembangan serta monitoring dan evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana yang baku dan standar
- Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Program Bangga Kencana yang menyeluruh dan teratur
- Terlaksananya analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan Program Bangga Kencana secara teratur dan berkelanjutan.

A.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran strategis DITLAPTIK yang tertera pada Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN 2020–2024, adalah mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi, dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut: Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana.

A.2 Arah Kebijakan

Dalam susunan Renstra BKKBN 2020–2024, Direktorat Pelaporan dan Statistik merupakan bagian dari Program Bangga Kencana/Program Teknis. Arah kebijakan dan strategi DITLAPTIK adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Satu Data Program Bangga Kencana

- Peningkatan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi Program Bangga Kencana melalui New SIGA;
- Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan data dan informasi Program Bangga Kencana melalui New SIGA;
- Peningkatan kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana yang masuk kedalam Standar Data Statistik (SDS) BPS.

2. Peningkatan penyebaran data dan informasi Program Bangga Kencana

- Peningkatan kualitas analisis dan evaluasi Program Bangga Kencana yang bersumber dari New SIGA;
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi diseluruh tingkatan wilayah.

B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Oleh sebab itu, sasaran kegiatan Direktorat Pelaporan dan Statistik adalah mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi.

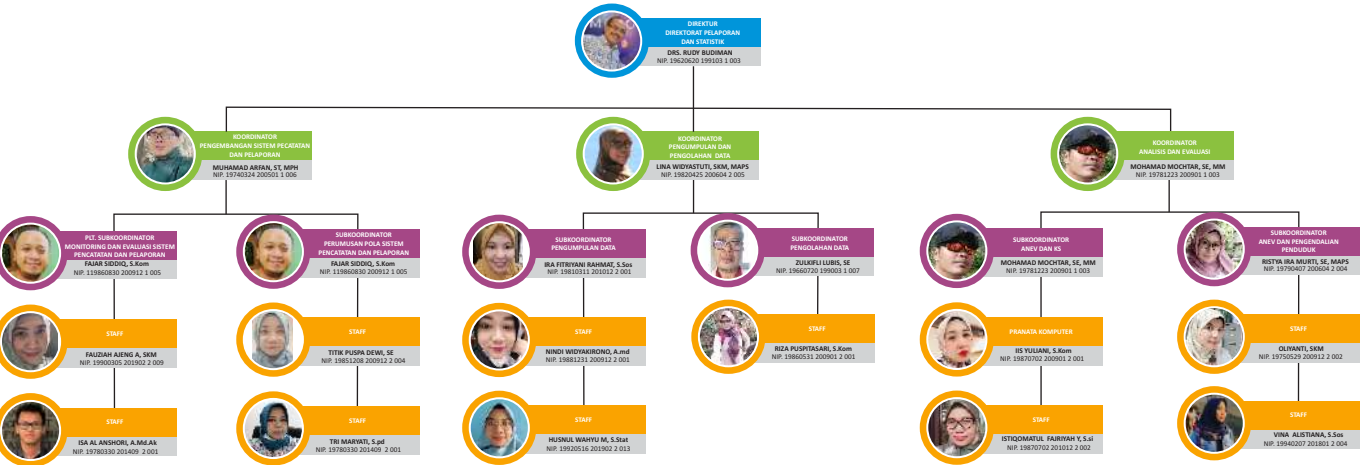
B.1 Dukungan Unit Kerja terhadap Program Bangga Kencana Tahun 2021

Sesuai dengan PERBAN BKKBN RI, Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penugasan Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan SubKoordinator Dalam Pelaksanaan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan BKKBN, susunan organisasi Direktorat Pelaporan dan Statistik terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Gambar. 2.1
Jabatan Fungsional Ditlapdik Tahun 2021



B.2 Rencana Kerja Tahun 2021

Berikut ini adalah uraian tentang Rencana Kinerja tahunan (RKT) beserta targetnya.

1. Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pencatatan dan Pelaporan.
Target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 2 (dua) dokumen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Standart Operational Prosedure Integrasi Data dengan Internal Eksternal
 - b. Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja Ditlapdik
2. Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga.
Target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 34 (tiga puluh empat) provinsi, terdiri dari:
 - a. Workshop Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Provinsi
 - b. Workshop Peningkatan Cakupan dan Kualitas Data Rutin
3. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21
Target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 1 (satu) sistem.
4. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi program Bangsa Kencana.
Target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 2 (dua) Sistem terdiri dari:
 - a. Penguatan secara substansi program;
 - b. Penguatan secara administrasi kegiatan dan keuangan
5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi.
Target Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi adalah 2 (dua) laporan, yang dipantau melalui e-monev Bappenas dan aplikasi SMART.

Untuk mewujudkan suatu manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka dilakukan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) masing-masing unit

kerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra), sehingga pelaksanaan kegiatan dilingkungan Direktorat Pelaporan dan Statistik dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian target.

Berikut ini adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan target sasaran yang akan dicapai melalui program/kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA TAHUN 2021	WAKTU PENCAPAIAN
Terwujudnya Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik yang berkualitas dan terintegrasi	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	2 (dua) dokumen	Tahunan
	Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga	34 (tiga puluh empat) provinsi	Tahunan
	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1 (satu) Sistem	Tahunan
	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi program Bangsa Kencana	2 (dua) Sistem	Tahunan
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi	2 (dua) Laporan	Tahunan

C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2022

- C.1 Dukungan Unit Kerja terhadap Program Bangsa Kencana Tahun 2022
Program Prioritas Tahun 2022 Mengacu kepada Renstra BKKBN 2020-2024 yaitu peningkatan kualitas data dan sistem Informasi Keluarga Program Bangsa Kencana di seluruh tingkatan
- C.2 Rencana Kerja Tahun 2022

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA TAHUN 2021	WAKTU PENCAPAIAN
Terwujudnya Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik yang berkualitas dan terintegrasi	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	2 (dua) dokumen	Tahunan
	Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga	34 (tiga puluh empat) provinsi	Tahunan
	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1 (satu) sistem	Tahunan
	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi program Bangsa Kencana	2 (dua) sistem	Tahunan
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi	2 (dua) laporan	Tahunan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK

NO	SASARAN KERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi	1	Indeks kualitas data dan informasi program bangga kencana	63,41 (skala 0-100)
		2	Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program Bangsa Kencana yang	34 Provinsi
		3	Jumlah pedoman di bidang tata kelola data dan informasi sistem informasi informasi keluarga	2 NSPK
		4	Provinsi yang mendapatkan fasilitas pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	34 Provinsi
		5	Jumlah sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi program bangga kencana yang berkualitas	3 Sistem Informasi
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi di bidang pelaporan dan statistik	5 Laporan
		7	Jumlah layanan pusat pengendali data stunting	1 Layanan

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020–2024 (Revisi), telah ditetapkan indikator kinerja utama DITLAPTIK dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja tahun 2021 beserta target capaian dari DITLAPTIK yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	Indeks kualitas data dan informasi program bangga kencana	60,69 (Skala 0-100)
	2	Pemanfaatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data dan Informasi Program Bangsa Kencana	3 Subsisitem
	3	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Program Bangsa Kencana yang Berkualitas	34 Provinsi
KEGIATAN		KOMPONEN	ANGGARAN
Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangsa Kencana dalam semua tingkatan wilayah	1	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	125.426.000
	2	Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga	92.305.000
	3	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	2.164.576.000
	4	Penguatan Pengelolaan Datadan Informasi program bangga kencana	396.903.000
	5	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi	426.366.000
		Total Anggaran	Rp.3.205.576.000



Penetapan sasaran dan indikator kinerjanya tidak terlepas dari rencana strategis dan pencapaian tujuan organisasi dalam rangka penyediaan data dan informasi Program Bangga Kencana yang cepat, akurat dan terpercaya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 didukung dengan anggaran setelah di-refocusing menjadi sebesar Rp2.511.120.000,-. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terlampir pada lembar Lampiran.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2021 telah dipublikasikan dalam website <http://www.bkkbn.go.id> yang dapat diakses oleh publik

E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

1. Rapat Kedeputan Bidang Adpin (Radep) dan Rapat Komponen (Rakom)
Rapat Kedeputan Bidang Adpin dilaksanakan setiap awal bulan yang diikuti semua unit kerja dilingkungan Adpin dan dihadiri semua pejabat fungsional dan staf pelaksana. Rapat komponen Ditlaptik dilakukan minimal 1 kali setiap bulan dan dihadiri semua pejabat fungsional dan staf pelaksana.
2. Evaluasi Rencana Aksi Penyampaian Kinerja (RAPK)
Direktorat Pelaporan dan Statistik dalam mencapai target kinerja tahun 2021 memerlukan program-program yang kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian akan dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (rencana aksi). Berikut ini adalah Rencana Aksi dari berbagai kegiatan yang ada di Direktorat Pelaporan dan Statistik. Tergambar pada tabel RAPK sebagai berikut :

RAPK sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Direktorat Pelaporan dan StatistikTahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN Rp	RENCANA AKSI SEMESTERAN		ALOKASI WAKTU
				I	II	
Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program Bangga Kencana	Penyusunan SOP integrasi data	Buku	96.402.000	✓		Jan-Jun
	Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja Ditlaptik	Buku	29.024.000	✓		Jan-Jun
Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan sistem informasi keluarga	Workshop Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Provinsi	Kegiatan	55.600.000	✓		Jan-Mar
	Workshop Peningkatan Cakupan dan Kualitas Data Rutin	Kegiatan	36.705.000	✓		Jan-Mar
Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	Pengembangan Panduan Tabulasi Pk21 dan NewSiga	Buku	67.668.000	✓		Jan-Mar
	Penggandaan PKKIT WilayahTimur(Papbar, Papua,Maluku,Malut, NTT)	Dokumen	435.920.000	✓		Jan-Mar
	Monitoring /Pengamatan Pk21	Laporan	787.500.000		✓	Mar-Nov
	Manajemen Tools PK21	Dokumen	300.000.000	✓		Jan-Jun
	Posko Pendataan PK21	Laporan	167.050.000	✓		Jan-Jun
	Harmonisasi Data PK21	Laporan	126.915.000		✓	Agust-Sept
	Seminar Hasil Sementara PK21	Dokumen	45.645.000		✓	Nov
	Penyusunan Profil Keluarga Indonesia	Buku	119.785.00		✓	Agust
	Penguatan Kerja Sama Data Lintas Sektor	Kegiatan	70.073.000		✓	Sept
	Ekspos Data Bersama Mitra Kerja	Laporan	44.020.000		✓	Jul
Penguatan Pengelolaan data dan Informasi Program Bangga Kencana	Penyusunan Laporan statistik Program Bangga Kencana	Laporan	59.250.000	✓	✓	Jan-Des
	Analisis dan Evaluasi Statistik Program Bangga Kencana (Bulanan,Semesteran danTahunan)	Dokumen	111.108.000	✓	✓	Jan-Des
	Pengembangan Validasi dan Output New SIGA	Dokumen	77.215.000	✓		Mei
	Forum penguatan satu data Bangga Kencana	Dokumen	33.000.000		✓	Juli
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data dan Informasi tingkat Pusat	Dokumen	116.330.000		✓	Juli
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Data dan Infromasi	Monev terpadu SIGA	Dokumen	142.590.000		✓	Sept
	Perencanaan program dan kegiatan Ditlaptik	Dokumen	52.058.000	✓	✓	Jan-Des
	Administrasi pengelolaan anggaran	Laporan	231.718.000	✓	✓	Jan-Des

Rencana Aksi Direktorat Pelaporan dan Statistik terdiri dari 5(lima) program. Untuk mencapai output dari kelima program tersebut kemudian masing –masing program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan.Untuk lebih lengkapnya, berikut ini disajikan kelima Program Direktorat Pelaporan dan Statistik beserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021:

- 1) Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program Bangsa Kencana
 - a.Penyusunan Standart Operational Prosedure Integrasi Data dengan Internal Eksternal
 - b.Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja Ditlaptik
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga
 - a. Workshop Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Provinsi
 - b. Workshop Peningkatan Cakupan dan Kualitas Data Rutin
- 3) Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21
 - a. Pengembangan Panduan Tabulasi Pk21 dan NewSiga
 - b. Penggandaan PKKit Wilayah Timur (Papbar, Papua, Maluku, Malut, NTT)
 - c. Monitoring / Pengamatan PK21
 - d. Manajemen Tools PK21
 - e. Posko Pendataan PK21
 - f. Harmonisasi Data PK21
 - g. Seminar Hasil Sementara PK21
 - h. Penyusunan Profil Keluarga Indonesia PK21
 - i. Penguatan Kerja sama Data Lintas Sektor
 - j. Ekspos Data Bersama Mitra Kerja
- 4) Penguatan Pengelolaan data dan Informasi Program Bangsa Kencana
 - a. Penyusunan Laporan statistik Program Bangsa Kencana (Umpan Balik)
 - b. Analisis dan Evaluasi Statistik Program Bangsa Kencana (Bulanan, Semesteran dan Tahunan)
 - c. Pengembangan Validasi dan Output New SIGA

- d. Forum penguatan satu data Bangsa Kencana
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelola Data dan Informasi tingkat Pusat

- 5) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Infromasi
 - a. Monev terpadu SIGA
 - b. Perencanaan program dan kegiatan Ditlaptik (KOREN, LAKIP, SPIP, RB, ZI/WBK dsb)
 - c. Administrasi pengelolaan anggaran



3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangsa Kencana melalui e- Monev dan SMART

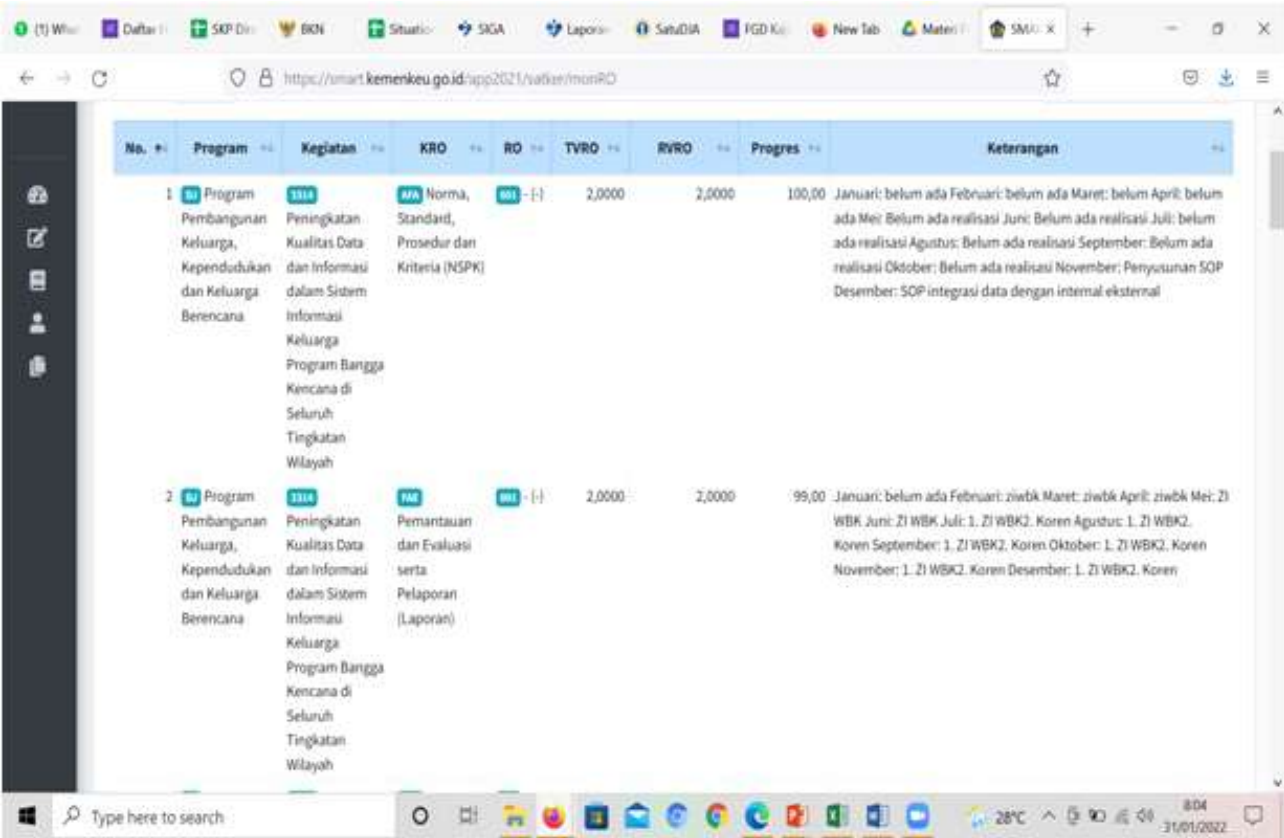
- a. Melalui e-Monev

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang diperoleh melalui aplikasi e-monev Bappenas per 31 Desember 2021, capaian kinerja DITLAPTIK mencapai 100% dari target. Sedangkan Capaian Anggarannya mencapai 99.10% dari target.

Tabel 2.5
Monitoring dan Evaluasi Kinerja DITLAPTIK
Per 31 Desember 2021

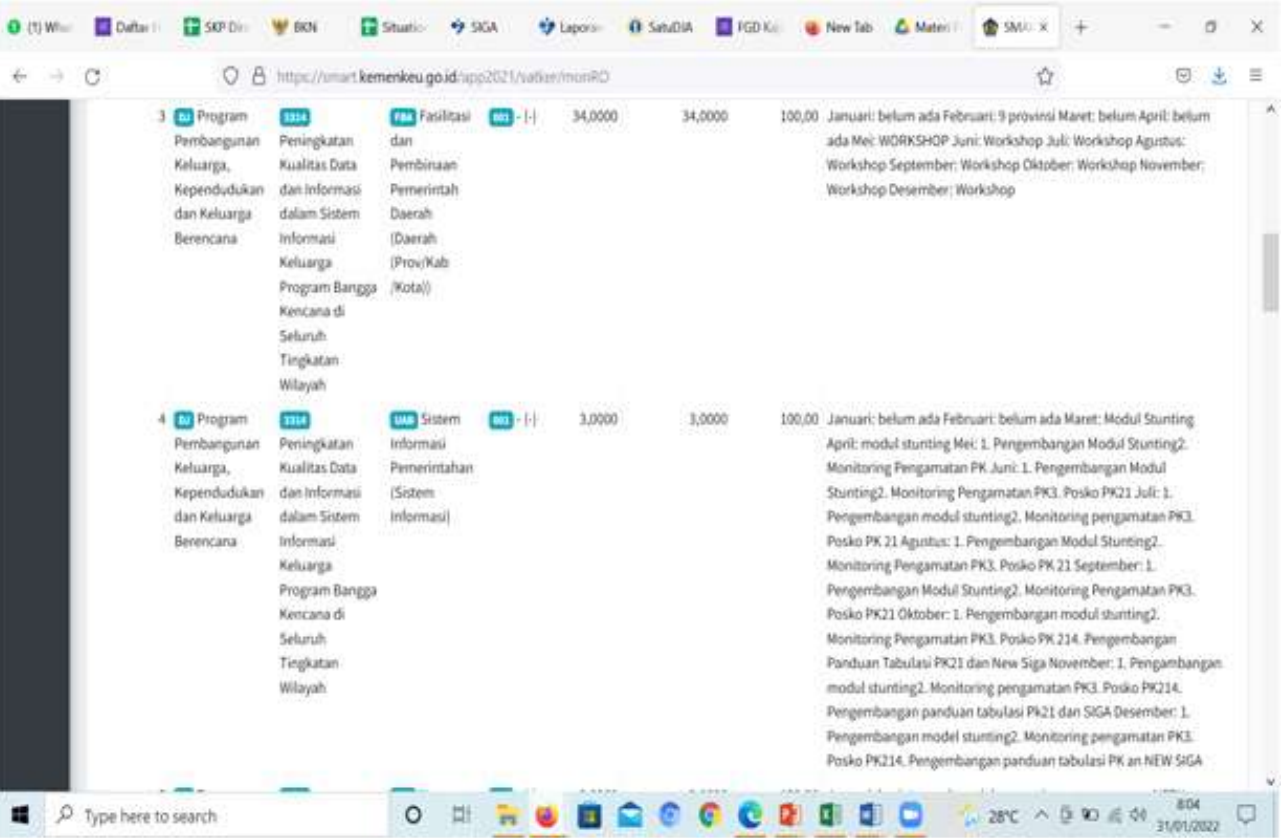
KODE RO	NAMA RO	KODE KOMPONEN	NAMA KOMPONEN	JENIS	SATUAN	VOLUME	REALISASI FISIK	REALISASI FISIK (KUMULATIF)	% REALISASI	ANGGARAN			PRESENTASE %
										ALOKASI	REALISASI	REALISASI (KUMULATIF)	
001	Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi program Bangsa Kencana yang berkualitas	124	Penguatan pengelolaan data dan informasi program Bangsa Kencana	Utama	Sistem Informasi	2.00	0.00	2.00	100.00	233.023.000.00	15.904.000.00	228.160.433.00	97.91
001	Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi program Bangsa Kencana yang berkualitas	123	Penguatan kordinasi pelaksanaan PK 21	Utama	Sistem Informasi	1.00	0.00	1.00	100.00	1.931.231.000.00	67.179.900.00	1.903.145.047.00	99.58
001	Pedoman di bidang tata kelola data dan informasi sistem informasi keluarga	121	Pengembangan kebijakan, strategi, dan materi pencatatan pelaporan	Utama	Dokumen	2.00	1.00	2.00	100.00	15.594.000.00	10.980.000.00	10.980.000.00	66.17
001	Provinsi yang mendapatkan fasilitas sistem informasi keluarga	122	Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan sistem informasi	Utama	Provinsi	34.00	4.00	34.00	100.00	53.426.000.00	10.220.000.00	53.049.000.00	99.29
001	Laporan pemantauan dan evaluasi di bidang pelaporan dan statistik	125	Pembinaan, monitoring dan evaluasi data dan informasi	Utama	Laporan	2.00	1.00	2.00	100.00	275.791.000.00	26.847.800.00	273.287.437.00	98.73
										2.551.120.000.000	131.131.700.00	2.488.621.917.00	99.10

b. Melalui SMART



The screenshot shows the SMART application interface with a table of activities. The table has columns for No., Program, Kegiatan, KRO, RO, TVRO, RVRO, Progres, and Keterangan. The first two rows are visible, showing activities related to family development and data quality improvement.

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
1	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1314 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	MA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	MA - [-]	2,000	2,000	100,00	Januari: belum ada Februari: belum ada Maret: belum ada April: belum ada Mei: belum ada realisasi Juni: belum ada realisasi Juli: belum ada realisasi Agustus: belum ada realisasi September: belum ada realisasi Oktober: belum ada realisasi November: Penyusunan SOP Desember: SOP integrasi data dengan internal eksternal
2	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1314 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	PAK Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan)	MA - [-]	2,000	2,000	99,00	Januari: belum ada Februari: ziwb Maret: ziwb April: ziwb Mei: Zi WBK Juni: Zi WBK Juli: 1. Zi WBK2. Koren Agustus: 1. Zi WBK2. Koren September: 1. Zi WBK2. Koren Oktober: 1. Zi WBK2. Koren November: 1. Zi WBK2. Koren Desember: 1. Zi WBK2. Koren



The screenshot shows the SMART application interface with a table of activities. The table has columns for No., Program, Kegiatan, KRO, RO, TVRO, RVRO, Progres, and Keterangan. The next two rows are visible, showing activities related to data quality improvement and information system development.

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
3	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1314 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	PAK Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	MA - [-]	34,000	34,000	100,00	Januari: belum ada Februari: 9 provinsi Maret: belum ada April: belum ada Mei: WORKSHOP Juni: Workshop Juli: Workshop Agustus: Workshop September: Workshop Oktober: Workshop November: Workshop Desember: Workshop
4	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1314 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	UAM Sistem Informasi (Sistem Informasi)	MA - [-]	3,000	3,000	100,00	Januari: belum ada Februari: belum ada Maret: Modul Stunting April: modul stunting Mei: 1. Pengembangan Modul Stunting2. Monitoring Pengamatan PK3. Posko PK21 Juni: 1. Pengembangan Modul Stunting2. Monitoring Pengamatan PK3. Posko PK21 Juli: 1. Pengembangan modul stunting2. Monitoring pengamatan PK3. Posko PK 21 Agustus: 1. Pengembangan Modul Stunting2. Monitoring Pengamatan PK3. Posko PK 21 September: 1. Pengembangan Modul Stunting2. Monitoring Pengamatan PK3. Posko PK21 Oktober: 1. Pengembangan modul stunting2. Monitoring Pengamatan PK3. Posko PK214. Pengembangan Panduan Tabulasi PK21 dan New Siga November: 1. Pengembangan modul stunting2. Monitoring pengamatan PK3. Posko PK214. Pengembangan panduan tabulasi PK21 dan SIGA Desember: 1. Pengembangan modul stunting2. Monitoring pengamatan PK3. Posko PK214. Pengembangan panduan tabulasi PK an NEW SIGA

Capaian Kinerja DITLAPTIK di tahun 2021 adalah sebesar 100%.

4. Perangkat / Aplikasi / Sistem Monev yang lain

- a. Pengembangan Sistem Aplikasi Pendataan Keluarga (pengolahan dan output)
- b. Pengembangan Sistem Aplikasi New SIGA

Akuntabilitas Kinerja

“

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) tahun 2021 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari sasaran yang ingin dicapai oleh DITLAPTIK.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Capaian kinerja DITLAPTIK dapat diketahui melalui hasil pengukuran kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan dilakukan analisis terhadap capaian kinerja, yaitu sebagai berikut.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

Dalam rangka mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi, maka ditetapkan:

“IKK atau Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan melalui Perjanjian Kinerja DITLAPTIK yaitu Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana yang akan digunakan untuk mengukur kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana yang memenuhi kriteria dari aspek cakupan, Ketepatan Waktu, Keakuratan data dan Pemanfaatan data”

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut didukung melalui Indikator Keluaran/Output yaitu pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi program Bangga Kencana serta Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Mewujudkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana	60,69(skala 0-100)	60,20(skala 0-100)	99,19
	Pemanfaatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan data dan informasi Program Bangsa Kencana	3 subsistem	3 subsistem	100
	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan data dan informasi Program Bangsa Kencana yang berkualitas	34 provinsi	34 provinsi	100

Dari pengukuran capaian kinerja tahun 2021 pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa hampir semua sasaran kegiatan **Mewujudkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik yang berkualitas dan terintegrasi**, BERHASIL DICAPAI KECUALI INDEKS KUALITAS DATA. Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Tahun 2021 sebesar 100%, tetapi untuk Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana capaiannya 99,19%

Kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana merupakan data dan informasi yang memenuhi kriteria dari aspek kelengkapan data, ketepatan waktu, keakuratan data (konsistensi dan akurasi data) dan pemanfaatan data sesuai kaidah WHO dan Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan.

Untuk menggambarkan kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana digunakan ukuran indeks, dengan target 2020–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Target Renstra Tahun 2020–2024

Satuan	Base Line 2019	2020		2021		Target 2022	Target 2023	Target 2024
		Target	Capaian	Target	Capaian			
Indeks (Skala 0-100)	53,05	57,60	60,6	60,69	60,2	63,41	66,51	70,05

Sumber: Target: Matriks Renstra BKKBN Tahun 2020-2024; Capaian: Hasil Olahan Data Statistik Rutin

Indeks kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana diukur melalui 6 (enam) variabel yang terdiri dari:

1
Kelengkapan Data

Data lengkap dilihat dari aspek content atau isi data. Variabel kelengkapan data diberikan bobot sebesar 10%. Adapun cara perhitungan skor kelengkapan adalah sebagai berikut:

Skor kelengkapan

$$= \frac{\text{jumlah laporan yang datanya tidak lengkap (sel kosong)}}{\text{jumlah laporan data sel data yang seharusnya terisi}} \times 100 \% \times 10\%$$

2
Ketepatan waktu /kemutakhiran data

Data up to date/terkini, sehingga dapat menggambarkan kondisi/fenomena yang terjadi saat ini. Variabel ketepatan waktu diberikan bobot sebesar 10%. Adapun cara perhitungan skor ketepatan waktu adalah sebagai berikut:

$$\text{skor ketepatan} = \frac{\text{jumlah unit yang melapor tepat waktu}}{\text{jumlah unit yang seharusnya melapor}} \times 100\% \times 10\%$$

3 & 4
Akurasi dan Konsistensi Data

Akurasi Data: data mampu mengukur kondisi yang sebenarnya atau data yang dilaporkan tidak banyak berubah (pada kondisi normal)
Konsistensi Data: data yang dilaporkan tidak menunjukkan adanya pencilan dari waktu ke waktu (konsistensi internal), dan data cakupan yang dilaporkan sesuai atau tidak jauh berbeda dibandingkan dengan data Pendataan Keluarga atau survei (konsistensi eksternal).

Variabel akurasi dan konsistensi data diberikan bobot sebesar 25%. Adapun cara perhitungan skor akurasi dan konsistensi data adalah sebagai berikut:

skor akurasi dan konsistensi = rata - rata rasio akurasi data x 25 %

Data yang dinilai dalam perhitungan skora kurasi dan konsistensi adalah data Pasangan UsiaSubur (PUS), Peserta KB Aktif (PA), Peserta KB Baru (PB), Unmet Need KB, CPR, sertasasaran dan keluarga anggota BKB hadir pertemuan.

5
Verifikasi Data

Mekanisme untuk mengetahui keakuratan data, dimana verifikasi dilakukan dengan cara melihat data langsung kesumber data yang membuat pelaporan. Hal ini bertujuan untuk melakukan cross check data agar dapat diketahui akurasi data yang dilaporkan. Berdasarkan hasil verifikasi data akan diperoleh rasio akurasi, selanjutnya rasio akurasi dapat menggambarkan 3 (tiga) kemungkinan hasil verifikasi, yaitu akurat, over-reporting, dan under-reporting

Variabel verifikasi data diberikan bobot sebesar 35%. Adapun cara perhitungan skor verifikasi data adalah sebagai berikut:

$$\text{skor verifikasi} = \frac{\text{data hasil cross check yang dihitung ulang}}{\text{data yang dilaporkan}} \times 35\%$$

6
Pemanfataan Data

Data dimanfaatkan oleh internal atau eksternal BKKBN, yang digunakan untuk perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, salah satu bahan perencanaan, bahan evaluasi, bahan advokasi dan KIE, bahan referensi penelitian atau bahan ajar.

Variabel pemanfaatan data diberikan bobot sebesar 20%. Adapun cara perhitungan skor pemanfaatan data adalah sebagai berikut:

skor pemanfaatan = unit melaporkan ada pemanfaatan data x 20%

Oleh karena itu, cara perhitungan indeks komposit dalam mengukur kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana adalah sebagai berikut:

indeks komposit
= skor kelengkapan + skor ketepatan + skor akurasi dan konsistensi
+ skor verifikasi skor pemanfaatan

Pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi COVID 19, sehingga tidak memungkinkan dilakukan verifikasi data kelini lapangan. Dengan asumsi tidak dilakukan verifikasi data, maka perhitungan indeks kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana hanya 65% dari indeks yang seharusnya.

Adapun hasil perhitungan indeks kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana tahun 2021 adalah:

Tabel 3.3
Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana Tahun 2021

PROVINSI	KETEPATAN WAKTU		KELENGKAPAN		AKURASI DAN KONSISTENSI		PEMANFAATAN		INDEKS
	CAPAIAN	SKOR	CAPAIAN	SKOR	CAPAIAN	SKOR	CAPAIAN	SKOR	
DKI Jakarta	91.7	9.2	92.0	9.2	63.1	15.8	100	20	54.1
Jawa Barat	83.3	8.3	97.4	9.7	97.1	24.3	100	20	62.4
Jawa Tengah	91.7	9.2	97.1	9.7	85.9	21.5	100	20	60.3
D I Yogyakarta	100.0	10.0	99.0	9.9	86.3	21.6	100	20	61.5
Jawa Timur	75.0	7.5	96.2	9.6	96.1	24.0	100	20	61.1
Banten	100.0	10.0	99.0	9.9	89.7	22.4	100	20	62.3
Bali	75.0	7.5	99.2	9.9	88.6	22.2	100	20	59.6
Aceh	100.0	10.0	90.3	9.0	84.9	21.2	100	20	60.2
Sumatera Utara	100.0	10.0	96.5	9.7	84.2	21.1	100	20	60.7
Sumatera Barat	83.3	8.3	92.6	9.3	79.6	19.9	100	20	57.5
Sumatera Selatan	100.0	10.0	91.7	9.2	100.0	25.0	100	20	64.2
Lampung	83.3	8.3	95.8	9.6	91.9	23.0	100	20	60.9
Bangka Belitung	100.0	10.0	100.0	10.0	97.3	24.3	100	20	64.3
Nusa Tenggara Barat	100.0	10.0	97.3	9.7	87.0	21.7	100	20	61.5
Kalimantan Barat	100.0	10.0	73.7	7.4	92.6	23.1	100	20	60.5
Kalimantan Selatan	100.0	10.0	93.8	9.4	99.8	25.0	100	20	64.3
Sulawesi Utara	100.0	10.0	88.9	8.9	100.0	25.0	100	20	63.9
Sulawesi Selatan	75.0	7.5	93.2	9.3	87.5	21.9	100	20	58.7
Gorontalo	100.0	10.0	92.5	9.2	98.8	24.7	100	20	63.9
Sulawesi Barat	100.0	10.0	94.6	9.5	88.9	22.2	100	20	61.7
Riau	83.3	8.3	89.1	8.9	84.4	21.1	100	20	58.3
Jambi	100.0	10.0	69.8	7.0	70.9	17.7	100	20	54.7
Bengkulu	75.0	7.5	98.4	9.8	93.7	23.4	100	20	60.8
Kepulauan Riau	91.7	9.2	82.9	8.3	93.4	23.4	100	20	60.8
Nusa Tenggara Timur	100.0	10.0	97.2	9.7	85.2	21.3	100	20	61.0
Kalimantan Tengah	100.0	10.0	88.4	8.8	97.9	24.5	100	20	63.3
Kalimantan Timur	83.3	8.3	98.8	9.9	86.8	21.7	100	20	59.9
Kalimantan Utara	100.0	10.0	81.6	8.2	75.7	18.9	100	20	57.1
Sulawesi Tengah	100.0	10.0	95.8	9.6	93.4	23.3	100	20	62.9
Sulawesi Tenggara	100.0	10.0	87.4	8.7	91.1	22.8	100	20	61.5
Maluku	100.0	10.0	81.2	8.1	92.8	23.2	100	20	61.3
Maluku Utara	91.7	9.2	93.3	9.3	96.3	24.1	100	20	62.6
Papua	83.3	8.3	89.5	8.9	85.2	21.3	100	20	58.6
Papua Barat	75.0	7.5	58.7	5.9	31.7	7.9	100	20	41.3
INDEKS KUALITAS DATA DAN INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2021									60.2

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indeks kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana tingkat nasional tahun 2021 adalah sebesar 60,2 atau tercapai sebesar 99,19% dari target 2021 sebesar 60,69.

Adapun Capaian Indeks untuk Provinsi sebagai berikut :

3 (Tiga) Provinsi
Tertinggi

Kalimantan Selatan (64,3)
Bangka Belitung (64,3)
Sumatera Selatan (64,62)

3 (Tiga) Provinsi
Terendah

Papua Barat (41,3)
DKI Jakarta (54,1)
Jambi (54,7)

Capaian indeks kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana tingkat nasional masih dianggap cukup rendah, sehingga hal ini mendorong untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan by name by address sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dilaporkan karena sangat kecil kemungkinan adanya manipulasi data.

Sedangkan dalam penerapan sasaran kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah melalui 5 komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun2021

Kegiatan		Komponen		Target 2021	Realisasi 2021	%
Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah		Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program BanggaKencana		2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	100
		Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100
		Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan		2 dokumen	2 dokumen	100
		Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan sistem in formasi keluarga		34 Provinsi	34 Provinsi	100
		Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi		2 laporan	2 laporan	100

Dari pengukuran capaian komponen tahun2021 tersebut, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan “Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah “BERHASIL DICAPAI” dengan rata-rata capaian keseluruhan sebesar 100%.

Adapun penjelasan capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut

- 1
- Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21
Pada komponen ini dapat mencapai 1 sistem informasi dari 1 sistem informasi yang ditargetkan pada tahun 2021, sehingga pencapaiannya sebesar 100%.
- 2
- Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangga Kencana
Pada komponen ini dapat mencapai 2 sistem informasi dari 2 sistem informasi yang ditargetkan pada tahun 2021, sehingga pencapaiannya sebesar 100%.
- 3
- Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan
Pada komponen ini dapat mencapai 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan pada tahun 2021, sehingga pencapaiannya sebesar 100%. Dua dokumen yang dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Pedoman Di Bidang Tata Kelola Data Dan Informasi Sistem Informasi Keluarga



Mekanisme Pengelolaan Data
Rutin Pelayanan KB

Panduan Indeks
Kualitas Data

- 4
- Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga
Pada komponen ini dapat mencapai 34 Provinsi dari 34 Provinsi yang ditargetkan pada tahun 2021, sehingga pencapaiannya sebesar 100%.
Dikarenakan selama 2021 masih terjadi masa pandemic Covid 19, maka pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan sistem informasi keluarga dilakukan secara hybrid yaitu berupa kunjungan teknis pada saat pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan serangkaian workshop dan sosialisasi secara online (virtual).

Tabel 3.5.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21)

NO	PROVINSI	WAKTU PELAKSANAAN
1.	DI YOGYAKARTA	14 - 17 APRIL 2021
2.	SULAWESI TENGAH	21 - 24 APRIL 2021
3.	JAWA BARAT	20 - 23 APRIL 2021
4.	KALIMANTAN SELATAN	20 - 23 APRIL 2021
5.	SUMATERA SELATAN	20 - 23 APRIL 2021
6.	MALUKU	27 - 30 APRIL 2021
7.	KALIMANTAN BARAT	27 - 30 APRIL 2021
8.	SUMATERA UTARA	27 - 30 APRIL 2021
9.	JAWA TIMUR	2 - 5 MEI 2021
10.	LAMPUNG	2 - 5 MEI 2021
11.	MALUKU UTARA	3 - 7 MEI 2021
12.	BALI	2 - 5 MEI 2021
13.	KEPULAUAN RIAU	19 - 22 MEI 2021
14.	PAPUA	19 - 22 MEI 2021
15.	PAPUA BARAT	19 - 22 MEI 2021
16.	GORONTALO	18 - 22 MEI 2021
17.	SULAWESI SELATAN	18 - 22 MEI 2021
18.	SULAWESI UTARA	19 - 22 MEI 2021
19.	JAWA TENGAH	19 - 22 MEI 2021
20.	NTT	16 - 19 MEI 2021
21.	RIAU	24 - 27 MEI 2021
22.	KALIMANTAN TIMUR	26 - 30 MEI 2021
23.	KALIMANTAN TENGAH	30 MEI - 3 JUNI 2021

	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	MATERI
Workshop Tabulasi penyajian data hasil pk21	19 oktober 2021	98 peserta Tingkat pusat, terdiri dari - 17 orang peserta dari Ditlaptik - 7 orang peserta dari eksternal Ditlaptik	Materi : tabulasi penyajian data hasil pk21
Workshop Preimplementasi pengelolaan data melalui New siga	28 - 29 oktober 2021	186 peserta Tingkat pusat, terdiri dari - 17 orang peserta dari ditlaptik - 7 orang peserta dari eks ditlaptik - tingkat provinsi sebanyak 120 orang peserta dari perwakilan bkkbn provinsi seluruh indonesia	Materi : 1. Pengantar workshop pre- implementasi new siga 2. Update mekanisme pelaksanaan uji coba new siga 3. Pengenalan portal user new siga 4. Modul rekap data keluarga 5. Review updating K/O 6. Modul entri R/I/KB 7. Modul entri R/II/KB 8. Modul entri R/I/BKB 9. Modul entri R/I/BKB 10. Modul entri R/I/BKB 11. Modul entri R/I/PIKR 12. Modul entri R/I/UUPPKA 13. Modul entri R/I/PPKS 14. Modul entri R/I/PPKBD

5

Dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja DITLAPTIK Tahun 2021 menggunakan teknologi informasi (TI) yaitu melalui:



Monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada Sekretaris Utama c.q Biro Perencanaan.

Gambar 3.2

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANA DAN EKSPLOITASI
BULAN JANUARI TAHUN 2021**

PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2020					AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2020										KETERANGAN
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	ANGGARANPAJUGI (RP)	TARGET KINERJA BULAN JANUARI	REALISASI KINERJA BULAN JANUARI	% CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN JANUARI	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2021	REALISASI ANGGARANPAJUGI BULAN JANUARI	% REALISASI ANGGARANPAJUGI BULAN JANUARI	KEGIATAN/ACTIVITAS YANG TELAH DIUKURAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET	ANALISIS PERSEBARAN KESIMPULAN/REVISI/AGALAN	RENCANA PERUBAHAN ATAS KINERJA YANG BELUM TERCAPAI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=7x100%	9=7x100%	10	11=10x100%	12	13	14	15	
1	Terselenggaranya sistem informasi keuangan yang terintegrasi	Index Kualitas Sistem Informasi Keuangan (IKSIK)	60.69	2.255.576.300	3.00	0.00	0%	0%	-	0.00%	1. Proses Perencanaan Penyusunan SDP Integrasi Data dengan Sistem Akuntansi	Berikut ini temuan pemeriksaan lapangan:	Capaian target yang ditunjukkan oleh laporan kinerja di bawah ini:	perbaikan target dan laporan kinerja dilakukan dari tahun ke tahun.	
		(Rendahnya IKSIK)									2. Proses Pelaksanaan Penyusunan Rencana Evaluasi Kinerja Organisasi				
											3. Proses Pelaksanaan Workshop Pengukuran Pemetaan Data dan Informasi Internal				
											4. Proses Pelaksanaan Penyusunan Pengukuran Capaian dan Kualitas Data Mutu				
											5. Proses Pelaksanaan Pengembangan Platform Aplikasi PM21 dan Web Siga				
											6. Proses Pelaksanaan Pengembangan PM KS sebagai Yuror Digital (Papua, Maluku, Sulawesi Utara)				

Tahun 2021 merupakan tahun kedua atau mid-term dari Renstra 2020-2024, sehingga trend analisis dapat dibandingkan hanya dengan tahun 2020, begitu pula jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah di Renstra.

Tabel 3.6.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kualitas data dan informasi dalam sistem informasi keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	1 Indeks Kualitas Data dan Iformasi Program Bangga Kencana	Indeks (Skala 0–100)	57.60	60.69	63.41	66.51	70.05
		Keluaran/Output : Pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi Program Bangga Kencana	Subsistem	3	3	3	3	3
		1.1 Jumlah Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas	Provinsi	34	34	34	34	34
		Komponen						
		201 Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPk	Dokumen	4	4	4	4	4
		202 Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan	Mitra kerja	26	26	26	26	26
		203 Peningkatan kualitas data melalui penguatan sistem pelaporan dan statistik rutin	Dokumen	12	12	12	12	12
		204 Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi	Orang	600	600	600	600	600
205 Monitoring, Evaluasi dan fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi	Provinsi	19	19	19	19	19		

Rencana strategis 2020–2024 diatas memuat target kinerja sampai dengan tahun 2024. Capaian target indikator kinerja sampai pada tahun 2024 menjadi acuan untuk mencapai target jangka menengah tahun 2021. Berikut ini perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021.

Tabel 3.7.

Sasaran	Indikator Sasaran	2021			Target 2021	Keterangan
		Target	Real	%		
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi	1.Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	60,69 (Skala 0-100)	60,2 (Skala 100)	99,19	60,69 (Skala 0-100)	Indikator ini pada tahun 2021 belum dapat tercapai
	Keluaran/Output : Pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi Program Bangga Kencana	3 subsistem	3 subsistem	100	3 subsistem	Indikator ini pada tahun 2021 dapat tercapai
	1.1 Jumlah Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas	34 provinsi	34 provinsi	100	34 provinsi	Indikator ini pada tahun 2021 dapat tercapai

Kegiatan	Komponen	2021			Target 2021	Keterangan
		Target	Real	%		
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangsa Kencana di seluruh tingkatan wilayah	Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangsa Kencana	2 Sistem informasi	2 Sistem informasi	100	2 Sistem informasi	Indikator ini pada tahun 2021 dapat tercapai
	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	100	1 Sistem informasi	Indikator ini pada tahun 2021 dapat tercapai
	Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan*	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	Indikator ini pada tahun 2021 dapat tercapai

Ket *: Terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Renstra 2020 – 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi

Capaian kinerja DITLAPTIK tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yang terjadi selama tahun 2021 yang tentunya juga menentukan keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan dari capaian kinerja unit kerja Direktorat Pelaporan dan Statistik

ANALISIS KEBERHASILAN

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan pencapaian setiap indikator komponen pada Perjanjian Kinerja DITLAPTIK tahun 2021 yang mendukung Indikator Sasaran Kegiatan “Indeks Kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana” dalam mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangsa Kencana

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- Terselesainya laporan statistik rutin Program Bangsa Kencana seperti laporan umpan balik data rutin pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan, laporan potensi wilayah dan faskes semesteran, dan juga laporan analisis evaluasi Program (Radagram) setiap bulan selama tahun 2021. Selain itu juga terselesainya Panduan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ujicoba di Kampung KB Percontohan dan Pre-Implementasi New SIGA 2021 untuk mendukung berjalannya Sistem pencatatan dan pelaporan melalui New Siga.



Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan



Laporan Analisis dan Evaluasi Pengendalian Program dan Anggaran



Panduan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ujicoba di Kampung KB Percontohan dan Pre-Implementasi New SIGA 2021



Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan



Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan



Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

- Penguatan koordinasi antar kelompok substansi sehingga penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi dapat berjalan optimal
- Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai
- Mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia program Bangsa Kencana menjadi tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Pk21

Kegiatan prioritas pada komponen ini adalah pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021.

A. DEFINISI

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Pembangunan Keluarga, data Kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data individu anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan kekeluarga dari rumah kerumah.

B. ASPEK LEGALITAS



Penjelasan

- Penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tersebut, sesuai dengan pasal 49 sampai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, harus berdasarkan data dan informasi kependudukan dan keluarga sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran menekankan bahwa sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Keluarga.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga lebih lanjut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 63 BAB IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menekankan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain yang diperoleh melalui pendataan keluarga yang dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

C. SASARAN

Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dilaksanakan serentak pada tanggal 1 April hingga 6 Juli 2021 dengan sasaran untuk mendata keluarga dan keluarga khusus di Indonesia yang menjadi target pendataan.

- **Keluarga adalah** unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak (UU 52 Tahun 2009)
- **Keluarga Khusus adalah** keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri.

D. TUJUAN

- Penyediaan Data Keluarga
- Parameter utama dalam menyediakan data keluarga by name by address untuk digunakan dalam penetapan sasaran, intervensi dan optimalisasi operasional Program Bangga Kencana di lapangan
- Evidenced Based Policy kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan oleh pengelola dan pelaksana program di semua tingkatan
- Pemanfaatan Data secara luas
Pemanfaatan data keluarga untuk program pembangunan terkait lain

E. METODE

Metode SENSUS dengan mendata SELURUH KELUARGA yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah kerumah

F. TOOLS PENGUMPULAN DATA

Salah satu upaya peningkatan kualitas data, berbeda dengan pendataan-pendataan sebelumnya, pengumpulan data PK21 di lapangan sebagian besar dilakukan dengan menggunakan smartphone, kecuali pada daerah dengan kondisi geografis khusus, keterbatasan sinyal, dan keterbatasan sumber daya kader pendata dalam penggunaan smartphone; maka pendataan pada daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir.



Paperbased

- Kader Pendata melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F/I/PK/21;
- Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal ini dapat memanfaatkan Balai Penyuluhan KB.

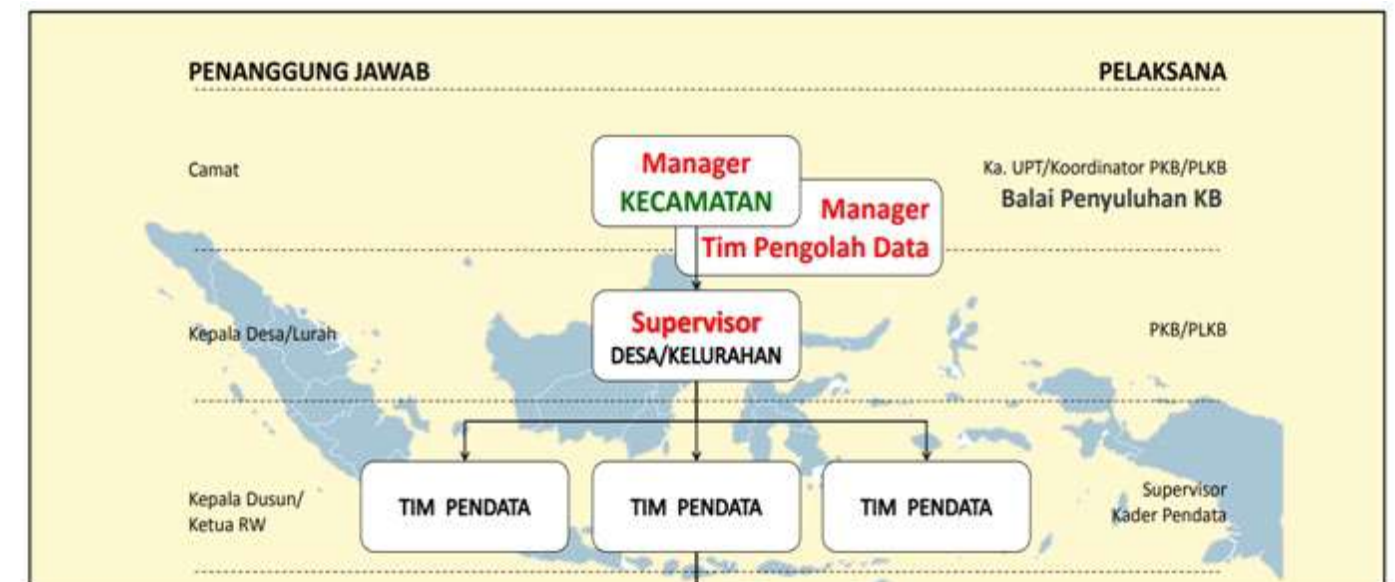


Smartphone

- Kader melakukan pengumpulan data dan input kedalam aplikasi menggunakan smartphone;
- Kader melakukan pengumpulan data dan input kedalam aplikasi menggunakan smartphone;
- Data akan masuk ke server regional untuk dilihat ketepatan pengisian dan kebenaran datanya oleh manajer data kecamatan;
- Data dapat masuk ke server pusat dengan persetujuan manager pengelolaan kecamatan

G. PENGORGANISASIAN LAPANGAN

Pelaksanaan PK21 tidak lepas dari komitmen kepemimpinan, peran pengelola data dan informasi tingkat pusat sampai dengan kecamatan, Petugas lini lapangan yang terdiri dari manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, dan kader pendata terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal.



Pengorganisasian Lapangan

Adapun jumlah petugas lini lapangan yang menjadi pelaksana PK21 adalah



Tenaga pelaksana Pendataan Keluarga 2021

Sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam manajemen pelaksanaan pendataan serta panduan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, disusun pedoman dan panduan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing aktor dalam pengorganisasian lapangan.



Pedoman dan Panduan Pelaksanaan PK21

H. HASIL PENDATAAN

Jumlah Keluarga yang berhasil didata pada PK21 68.478.139 Kepala Keluarga atau 102% dari target pendataan 66.828.571 keluarga.

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			KECAMATAN			KEPALA KELUARGA (KK)		
		ADA	TERDATA	%	ADA	TERDATA	%	TARGET KK	TERDATA	%
1	ACEH	23	23	100	289	289	100	1.211.893	1.196.842	98.76
2	SUMATERA UTARA	33	33	100	455	455	100	3.365.184	3.337.404	99.17
3	SUMATERA BARAT	19	19	100	179	179	100	1.243.306	1.201.691	96.65
4	RIAU	12	12	100	172	172	100	1.565.217	1.385.549	88.52
5	JAMBI	11	11	100	143	143	100	864.975	919.705	106.33
6	SUMATERA SELATAN	17	17	100	242	241	99.59	2.012.060	2.102.355	104.49
7	BENGKULU	10	10	100	129	129	100	487.564	516.748	105.99
8	LAMPUNG	15	15	100	228	225	98.68	2.140.237	2.158.048	100.83
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	7	100	47	47	100	360.983	390.497	108.18
10	KEPULAUAN RIAU	7	7	100	75	75	100	530.532	424.596	80.03
11	DKI JAKARTA*)	6	0	0	44	0	0	2.672.881	2.271.000	84.96
12	JAWA BARAT	27	27	100	628	627	99.84	12.671.383	13.283.382	104.83
13	JAWA TENGAH	35	35	100	576	576	100	9.217.374	10.679.773	115.87
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	5	100	78	78	100	1.111.417	1.080.421	97.21
15	JAWA TIMUR	38	38	100	666	666	100	10.861.864	11.848.066	109.08
16	BANTEN	8	8	100	155	155	100	2.928.478	2.658.505	90.78
17	BALI	9	9	100	57	57	100	1.100.238	1.048.611	95.31
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	10	100	117	117	100	1.379.548	1.528.192	110.77
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	22	100	309	309	100	1.123.934	1.057.231	94.07
20	KALIMANTAN BARAT	14	14	100	175	174	99.43	1.147.724	1.082.393	94.31
21	KALIMANTAN TENGAH	14	14	100	139	136	97.84	659.039	510.206	77.42
22	KALIMANTAN SELATAN	13	13	100	153	153	100	1.095.422	1.051.582	96.00
23	KALIMANTAN TIMUR	10	10	100	103	103	100	869.894	792.046	91.05
24	KALIMANTAN UTARA	5	5	100	53	43	81.13	146.776	125.675	85.62
25	SULAWESI UTARA	15	15	100	171	171	100	617.385	640.530	103.75
26	SULAWESI TENGAH	13	13	100	176	176	100	700.895	733.776	104.69
27	SULAWESI SELATAN	24	24	100	311	311	100	1.993.333	2.145.260	107.62
28	SULAWESI TENGGARA	17	17	100	222	222	100	579.112	604.791	104.43
29	GORONTALO	6	6	100	77	77	100	273.015	329.539	120.70
30	SULAWESI BARAT	6	6	100	69	69	100	296.221	287.945	97.21
31	MALUKU	11	11	100	118	117	99.15	354.284	288.831	81.53
32	MALUKU UTARA	10	10	100	116	116	100	252.801	237.528	93.96
33	PAPUA*)	29	28	96.55	560	414	73.93	791.961	476.620	60.18
34	PAPUA BARAT	13	13	100	176	176	100	201.641	82.801	41.06
NASIONAL		514	507	98.64	7.250	6.998	96.52	66.828.571	68.478.139	102.47

Cakupan Wilayah dan Keluarga Terdata Menurut Provinsi

Cakupan pendataan Keluarga berdasarkan wilayah, sebagai berikut:

- Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi telah melakukan pendataan keluarga 2021.
- Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 98,64%, artinya terdapat 507 kabupaten/kota telah melaksanakan pendataan keluarga dari 514 kabupaten/kota yang ada. Terdapat 7 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pendataan keluarga yaitu sebagai berikut:
 - 6 kabupaten/Kota di provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pendataan keluarga namun karena DKI Jakarta menggunakan sistem aplikasi yang berbeda maka masih menunggu proses integrasi antara aplikasi CARIK yang digunakan DKI Jakarta dengan database PK 21.
 - Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua belum melaksanakan pendataan keluarga 21 karena masih terjadi konflik di wilayah tersebut pada saat pelaksanaan PK 21.
 - Kecamatan, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 96,52%, artinya 6.998 kecamatan telah melaksanakan pendataan keluarga 21 dari 7.250 kecamatan yang ada. Terdapat 10 provinsi dengan cakupan kecamatan terdata kurang dari 100%.

I.INDIKATOR YANG DIHASILKAN

1) Indikator Kependudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala keluarga menurut status perkawinan, data anggota keluarga menurut jenis kelamin dan data kelompok umur; sehingga dirumuskan indikator kependudukan pada PK21 meliputi:

1. Nama anggota keluarga dan NIK

2. Jenis Kelamin

3. Tanggal, bulan dan tahun lahir

4. Status perkawinan

5. Usia Kawin Pertama

6. Kepemilikan akte lahir

7. Hubungan dengan Kepala Keluarga
8. Kode Ibu Kandung

9. Agama yang dianut

10. Status pekerjaan

11. Pendidikan

12. Kepesertaan JKN/
asuransi kesehatan lainnya

13. Keberadaan anggota keluarga
(1 tahun terakhir)

2) Indikator Keluarga Berencana

Berdasarkan PP 87 Pasal 46 ayat (3), Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB, dan jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB; sehingga dirumuskan indikator KB pada PK21 meliputi:

1. Jumlah kelahiran

2. Jumlah anak ideal

3. Status kehamilan

4. Keinginan punya anak

5. Penggunaan obat/alat/cara KB

6. Status penggunaan obat/alat/ cara KB

7. Lama penggunaan obat/alat/ cara KB yang dipakai terakhir
8. Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB

9. Jenis obat/alat/cara KB yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai

10. Sumber mendapatkan pelayanan KB terakhir

11. Jenis informasi yang didapatkan pada saat pertama kali dating ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan obat/alat/cara KB terakhir

3) Indikator Pembangunan Keluarga

Berdasarkan PP 87 pasal 46 ayat (4), data keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peranan dalam masyarakat; sehingga dirumuskan indikator Pembangunan Keluarga pada PK21 meliputi:

1. Setiap anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai kepercayaannya

2. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang

3. Konflik antar anggota keluarga dalam 6 bulan terakhir

4. Setiap anggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 kali sehari

5. Keluarga memiliki simpanan/ tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu

6. Anggota keluarga sakit sehingga meninggalkan aktivitasnya dalam 1 bulan terakhir

7. Keluarga memiliki akses informasi dari media

8. Anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari

9. Pengasuhan anak dilakukan bersama

10. Anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 bulan sekali

11. Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan RT dalam waktu 1 tahun terakhir

12. Keluarga memiliki tempat
14. Keluarga memiliki balita (0-6) tahun ikut kegiatan BKB

15. Keluarga memiliki remaja (10-24 tahun) ikut kegiatan BKR

16. Ada anggota keluarga masih remaja (10-24) tahun ikut kegiatan PIK remaja

17. Keluarga lansia atau memiliki lansia (>60 tahun) ikut kegiatan BKL

18. Keluarga mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

19. Jenis atap rumah terluas

20. Jenis dinding rumah terluas

21. Jenis lantai rumah terluas

22. Sumber penerangan utama

23. Sumber air minum utama

24. Bahan bakar utama untuk memasak

25. Memiliki fasilitas tempat buang air besar

26. Kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal

27. Luas rumah/bangunan keseluruhan

28. Orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan

29. Keluarga pernah memperoleh/ mendengar/melihat pesan/informasi program KKBPK dari media

30. Media sumber informasi

31. Keluarga pernah memperoleh/ mendengar/melihat pesan atau informasi program KKBPK dari petugas

32. Petugas sumber informasi



Faktor keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- Terdapat koordinasi yang baik antara BKKBN Pusat, BKKBN Perwakilan Provinsi sampai dengan tenaga ditingkat lini lapangan
- Terdapat koordinasi yang baik antara BKKBN dengan Kementerian/Lembaga lain dan mitra kerja
- Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan Pemerintah Daerah di semua tingkatan wilayah
- Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai
- Mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia program Bangga Kencana menja ditepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya
- Supporting helpdesk PK21 yang diinisiasi oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik sehingga permasalahan yang ditemukan dilapangan dapat segera terselesaikan dengan baik

3. Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan

Pada komponen ini fokus kepada pengembangan panduan-panduan pencatatan dan pelaporan data statistik rutin. Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen/laporan selalu dilakukan dengan perencanaan yang baik
- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen/laporan biasanya dilakukan secara konsinyering dan juga memaksimalkan pertemuan secara daring sehingga para penyusun laporan bisa lebih fokus dalam menyelesaikan dokumen/laporan yang berkaitan dengan sistem pencatatan dan pelaporan
- Adanya nara sumber yang terpercaya dan kompeten sehingga lebih memudahkan dalam penyusunan dokumen/laporan
- Mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia program Bangga Kencana menjadi tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya
- Adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai
- Adanya dukungan waktu yang cukup sehingga penyelesaian laporan menjadi tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Memaksimalkan pertemuan secara daring

Gambar

Pedoman Dibidang Tata Kelola Data Dan Informasi Sistem Informasi Keluarga



Mekanisme Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB



Panduan Indeks Kualitas Data

4. Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan sistem informasi keluarga

Pada komponen ini fokus pada kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi pengelola data dan informasi di tingkat provinsi melalui kegiatan seperti workshop Tabulasi Penyajian Data Hasil PK21 dan Workshop Pre-Implementasi Pengelolaan Data Rutin melalui New SIGA.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- Adanya motivasi tinggi dari para pengelola data dan informasi di provinsi dan kabupaten/kota yang ingin mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kompetensi, seperti kegiatan workshop Tabulasi Penyajian Data Hasil PK21 dan Workshop Pre-Implementasi Pengelolaan Data Rutin melalui New SIGA pertemuan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi para pengelola data di provinsi dan kabupaten/kota.
- Adanya keinginan yang kuat dari seluruh pengelola data dan informasi di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk dapat menyediakan data yang valid, akurat, dan terpercaya sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pengelola data dan informasi menjadi favorit diikuti oleh para peserta (pengelola data dan informasi).
- Adanya dukungan dana yang memadai.
- Adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai.
- Adanya dukungan waktu yang cukup sehingga penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi pengelola data dan informasi menjadi tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.



5. Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut.

- Adanya dukungan sumber daya yang kompeten dan memadai untuk melakukan monitoring capaian indikator kinerja utama direktorat Pelaporan dan dan Statistiktahun 2021 melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan Smart
- Adanya semangat dari para pengelola data dan informasi di provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan informasi dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di lapangan secara tepat waktu.
- Adanya kesadaran dari pengelola data dan informasi di provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan data yang cepat, akurat, dan terpercaya sehingga provinsi dan kabupaten/kota perlu mendatangkan nara sumber dari Pusat.
- Adanya kesadaran moral dari Pusat untuk melaksanakan pemantauan tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sudah dan sedang berjalan, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam melaksanakan mekanisme penyediaan data yang baik, cepat, akurat dan terpercaya, baik itu data tentang pelayanan KB, data pengendalian lapangan, maupun data Pendataan Keluarga.
- Adanya dukungan dana yang memadai.
- Adanya dukungan waktu yang cukup sehingga penyelenggaraan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi menjadi tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan target kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 3.12

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi di Beberapa Perwakilan BKKBN



ANALISIS KEGAGALAN

Penyelenggaraan kegiatan dan program oleh DITLAPTIK sepanjang tahun 2021 dilakukan dengan terencana dan fokus, sehingga pencapaian setiap indikator di dalam Penjanjian Kinerja DITLAPTIK dapat tercapai 100%

Oleh sebab itu, untuk “analisis kegagalan” kami lebih tepat menyebutkan sebagai “beberapa kendala yang ditemui” saat penyelenggaraan kegiatan dan program di tahun 2021, yaitu sebagai berikut.

- Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi terhadap Program KB, sehingga yang berdampak kepada rendahnya kualitas dan kuantitas data di wilayah tersebut.
- Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya data untuk intervensi program Bangga Kencana di lini lapangan dan belum semua pengelola Program Bangga Kencana memiliki pemahaman yang sama tentang data pelayanan KB, data pengendalian lapangan, dan data Pendataan Keluarga.
- Banyaknya pemekaran wilayah di setiap kabupaten/kota sehingga berpengaruh pada kode wilayah dan database keluarga.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan data, seperti sinyal internet yang lemah di beberapa daerah yang sulit dijangkau, laptop dan komputer yang kurang memadai jumlahnya yang tentunya hal ini diperlukan oleh pengelola data (operator dan administrator data) Program Bangga Kencana.
- Cepatnya pergantian pegawai yang mengelola data Program Bangga Kencana (operator dan administrator data) di provinsi dan kabupaten/kota membuat penyelenggaraan data sedikit banyaknya terganggu
- Pandemi covid-19 mempengaruhi hampir semua pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan



SOLUSI

Beberapa kendala yang ditemui oleh DITLAPTIK tentunya kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk ditemukan solusinya. Berikut ini adalah solusi yang bisa dilaksanakan dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui selamatahun2021

- Meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah
- Dilakukan orientasi secara berjenjang baik melalui daring maupun luring untuk dapat memberi pemahaman akan pentingnya data untuk intervensi program sehingga dapat mengoptimalkan cakupan baik secara kualitas maupun kuantitas
- Memastikan pengelola data di tingkat wilayah untuk melakukan updating basis data wilayah yang terupdate
- Dilakukan advokasi terhadap Direktorat Teknologi, Informasi, dan Data (DITEKDA) untuk mengalokasikan dananya untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, seperti sinyal internet, laptop dan komputer yang diperlukan oleh pengelola data (operator dan administrator data) Program Bangga Kencana.
- Karena mutasi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka yang bisa dilakukan oleh DITLAPTIK adalah agar pengganti pengelola data (operator dan administrator data) dapat diberikan ilmu dalam pengelolaan data dan informasi oleh pengelola data yang lama, ataupun boleh juga jika provinsi atau kabupaten/kota melakukan orientasi dan sosialisasi secara berkala, sehingga selain melatih bagi tenaga yang baru juga bisa menjadi refresh bagi pengelola data yang lama.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu anggaran maupun sarana prasarana yang tersedia

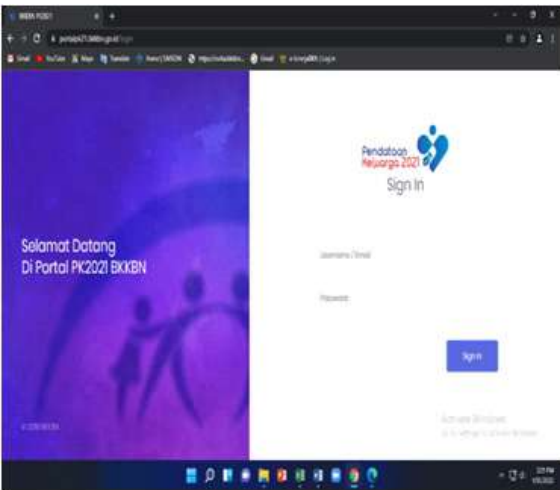
4. Analisis Aspek Manfaat Capaian IKK DITLAPTİK bagi Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana

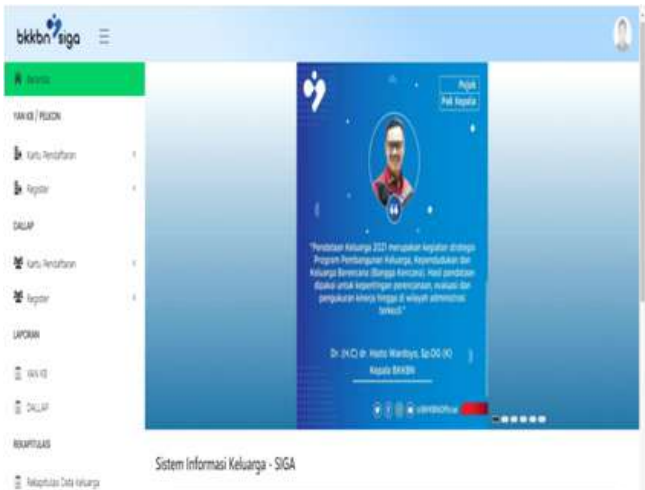
Data yang berkualitas dan terintegrasi ini termasuk juga data mengenai kondisi masyarakat terkini yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang ada di DITLAPTİK, yaitu melalui data Pendataan Keluarga tahun 2021 dan yang dimutakhirkan setiap tahunnya, data Statistik Rutin, dan data SIGA yang dilakukan setiap bulannya.

Dengan diperolehnya data yang berkualitas dan terintegrasi tersebut akan membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial, antara lain dalam bidang: transportasi komunikasi tata ruang dan lingkungan perumahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya agar intervensi program kemasyarakatan dapat lebih tepat sasaran.

Gambar
Aplikasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang ada pada
Direktorat Pelaporan dan Statistik



<https://portalpk21.bkkbn.go.id/login>



<https://newsiga.bkkbn.go.id/#/beranda>



<https://siga.bkkbn.go.id/>



<http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/>

5. Analisis terhadap Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Berikut ini Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 untuk masing-masing komponen kinerja :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Anggaran
Tahun 2021 Untuk Komponen Penguatan Pengelolaan Data Dan Informasi Program

Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Penguatan Pengelolaan Data Dan Informasi program Bangsa Kencana	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	100	233.028.000	228.160.433	97,91

REALISASI KINERJA

Realisasi kinerja dapat tercapai 2 Sistem Informasi dari 2 target Sistem informasi yang ditentukan, berarti dapat tercapai sampai dengan 100%.

VS

REALISASI ANGGARAN

Penggunaan dana bagi komponen ini sebesar Rp.228.160.433 dari pagu anggaran yang disediakan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 233.028.000 Hal ini berarti penggunaan pagu anggaran pada komponen ini sebesar 97,91%.

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Untuk Komponen Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21

Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1.931.281.000	1.923.145.047	99,58%

REALISASI KINERJA

Pencapaian realisasi kinerja yang sebesar 1 Sistem Informasi ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Ditlapdik tahun 2021, yaitu 1 sistem informasi Hal ini berarti realisasi kinerja DITLAPTİK pada indikator ini mencapai 100%.

VS

REALISASI ANGGARAN

Penggunaan dana bagi komponen ini sebesar Rp. 1.923.145.047 dari pagu anggaran yang disediakan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 1.931.281.000 Hal ini berarti penggunaan pagu anggaran pada komponen ini sebesar 99,58%.

Tabel3.16
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun2021 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 untuk Komponen Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan

Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	100	16.594.000	10.980.000	66,17 %

REALISASI KINERJA

Pencapaian realisasi kinerja yang sebesar Dokumen ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Ditlaptik tahun2021, yaitu2 Dokumen Hal ini berarti realisasi kinerja DITLAPTIK pada indikator ini mencapai 100%.

VS

REALISASI ANGGARAN

Penggunaan dana bagi komponen ini sebesar Rp. 10.980.000 Dari pagu anggaran yang disediakan pada tahun2021, yaitu sebesar Rp. 16.594.000. Hal ini berarti penggunaan pagu anggaran pada komponen ini sebesar 66,17%.

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Untuk Komponen Fasilitas dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga

Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Fasilitas Dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga	34 Provinsi	34 Provinsi	100	53.426.000	53.049.000	99,29%

REALISASI KINERJA

Pencapaian realisasi kinerja yang sebesar 34 Provinsi ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Ditlaptik tahun 2021, yaitu 34 Provinsi Hal ini berarti realisasi kinerja DITLAPTIK pa da indicator ini mencapai 100%.

VS

REALISASI ANGGARAN

Penggunaan dana bagi komponen ini sebesar Rp. 53.049.000 dari pagu anggaran yang disediakan pada tahun2021, yaitu sebesar Rp. 53.426.000 Hal ini berarti penggunaan pagu anggaran pada komponen ini sebesar 99,29%.

Tabel3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun2021dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Untuk Komponen Pembinaan, Monitoring Dan evaluasi Data Dan Informasi

Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	276.791.000	273.287.437	98,73

REALISASI KINERJA

Pencapaian realisasi kinerja yang sebesar 2 laporan ini sesuai dengan target yang telahditentukan dalam Perjanjian Kinerja Ditlaptiktahun 2021. Hal ini berarti realisasi kinerja DITLAPTIK pada indikator ini mencapai 100%.

VS

REALISASI ANGGARAN

Penggunaan dana bagi komponen ini sebesar Rp273.287.437 dari pagu anggaran yang disediakan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp276.791.000 Hal ini berarti penggunaan pagu anggaran pada komponen ini sebesar 98,73%.

Kesimpulan (inefisiensi/efisiensi) pada setiap Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Anggaran Tahun2021 Berikut ini adalah kesimpulan (inefisiensi/efisiensi) pada setiap Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 perkomponen.



No	Komponen Kinerja	Kesimpulan
1	Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangga Kencana	Pada komponen ini terlihat bahwa dengan menggunakan dana sebesar Rp228.160.433 atau 97,91% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar 228.160.433, namun dapat tercapai realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa :  “DITLAPTIK efisien dalam penggunaan dana pada komponen ini dengan tetap pencapaian kinerjanya mencapai 100% Sistem Informasi tercapai selama satu tahun)”
2	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	Penggunaan dana mencapai 99,58% atau sebesar Rp. 1.923.145.047 dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.931.281.000, pencapaian realisasi kinerja pada komponen ini tercapai 100% . Hal ini menunjukkan bahwa :  “DITLAPTIK mampu melakukan efisiensi pada penggunaan pagu anggaran dengan tetap dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. (Sistem Informasi Tercapai)”
3	Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	Dengan penggunaan pagu anggaran sebesar Rp. 10.980.000 atau sebesar 66,17 % dari pagu anggaran pada komponen ini sebesar Rp.16.594.000 dan mampu mencapai realisasi kinerja pada komponen sebesar 2 dokumen dari 2 dokumen (100%). Hal ini menunjukkan bahwa :  “DITLAPTIK efisien dalam penggunaan dana pada komponen ini dengan tetap pencapaian kinerjanya mencapai 100% (Dokumen tercapai dalam satu tahun)”
4	Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan sistem informasi keluarga	Dengan penggunaan pagu anggaran yang hampir 100%, yaitu sebesar Rp. 53.049.000 atau 99,29% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp53.426.000, dan mampu mencapai realisasi kinerja pada komponen sebesar 34 Provinsi dari 34 Provinsi yang telah ditetapkan Hal ini menunjukkan bahwa :  “DITLAPTIK efisien dalam penggunaan dana pada komponen ini dengan tetap pencapaian kinerjanya mencapai 100% (34 Provinsi tercapai dalam satu tahun)”
5	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi	Penggunaan anggaran pada komponen ini yang sebesar Rp. 27.328.7437 atau 98,73% dari pagu anggaran yang disediakan pada komponen ini yaitu sebesar Rp. 276.791.000, dan mampu mencapai realisasi kinerja pada komponen sebesar 2 laporan dari 2 laporan yang telah ditetapkan Hal ini menunjukkan bahwa :  “DITLAPTIK efisien dalam penggunaan dana pada komponen ini dengan tetap pencapaian kinerjanya mencapai 100% (34 Provinsi tercapai dalam satu tahun)”

Kesimpulan (inefisiensi/efisiensi) Level Unit Kerja dari Rata-rata Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tabel 3.19.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangga Kencana	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	100%	233.028.000	228.160.433	97,91
2.	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1.931.281.000	1.923.145.047	99,58
3.	Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	100%	16.594.000	10.980.000	66,17
4.	Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan system informasi keluarga	34 Provinsi	34 Provinsi	100%	53.426.000	53.049.000	99,29
5.	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	276.791.000	273.287.437	98,73
Jumlah				100%	2.511.120.000	2.488.621.917	99,10

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 diatas, maka Rata-rata Perbandingan Realisasi Kinerja DITLAPTIK Tahun 2021 sebesar 100% dari lima komponen yang ada di Perjanjian Kinerja DITLAPTIK tahun 2021”

Adapun rata-rata realisasi anggaran yang berhasil dicapai oleh DITLAPTIK pada tahun 2021 adalah 99,10%, maka kesimpulan dari level unit kerja DITLAPTIK adalah bahwa:

“
DITLAPTIK berhasil melakukan efisiensi pagu anggaran pada tahun 2021, yaitu dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.488.621.917 atau sebesar 99,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.511.120.000, namun demikian, realisasi kinerja mencapai 100% pada rata-rata seluruh indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja DITLAPTIK tahun 2021

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaporan Dan Statistik

Dukungan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah yang dilaksanakan oleh DITLAPTIK dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.511.120.000 dengan penyerapan sebesar Rp 2.488.621.917 atau 99,10 %.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2021

Kegiatan	Komponen	Pagu (Rp)	Anggaran			
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)	Sisa (%)
Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah	Penguatan pengelolaan Data dan Informasi program Bangga Kencana	233.028.000	228.160.433	97.91	4.867.567	2.09
	Penguatan Koordinasi Pelaksanaan PK21	1.931.281.000	1.923.145.047	99.58	8.135.53	0.42
	Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Materi Pencatatan dan Pelaporan	16.594.000	10.980.000	66.17	5.614.000	33.83
	Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan sistem informasi keluarga	53.426.000	53.049.000	99.29	377.000	0.71
	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi data dan informasi	276.971.000	273.287.437	98.73	3.503.563.00	1.27
Jumlah		2.511.120.000	2.488.621.917	99.10	22.498.083	0.90

Sumber : E-Monev Bappenas Tahun 2021

REALISASI ANGGARAN

Rp 2.488.621.917 dari pagu anggaran Rp. 2.511.120.000 Pada tahun 2021 atausebesar 99,10%

VS

SISA PAGU ANGGARAN

Sisa pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 22.498.083 atau 0.90%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% maka hal ini menunjukkan bahwa anggaran DITLAPTIK tahun 2021 digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai output kegiatan yang diharapkan.

Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran

Dukungan anggaran tahun 2021 telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pengelolaan anggaran masih terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan terkadang belum sesuai dengan Alokasi dan Jadwal Kegiatan (AJK). Hal ini disebabkan karena DITLAPTIK begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan sehingga menyedot sumber daya manusia yang besar. Akibatnya, pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari di DITLAPTIK kekurangan sumber daya manusia.
2. Pada pelaksanaan realisasi anggaran sehari-hari terkadang terjadi salah komunikasi ataupun bisa dikatakan kurang koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pengelola anggaran

C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

1. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Vaksinasi Covid-19 Oleh Tempat Praktik Bidan Mandiri (TPMB) Bagi Keluarga Tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka telah ditetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Intervensi yang perlu dilakukan tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian vaksinasi Covid-19, yang dituangkan dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga. BKKBN mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga melalui pendayagunaan tenaga pada Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Tahun 2021. Program vaksinasi Covid-19 oleh TPMB dilaksanakan pada 25 Provinsi dengan sasaran 172 kabupaten/kota sebagai lokasi utama. Untuk target vaksinasi Covid-19 oleh TPMB sejumlah 37.000.000 orang atau 72.000.000 dosis.

Mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi keluarga diawali dengan pelayanan vaksinasi di TPMB. Pencatatan dilakukan di TPMB dan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih tinggi dengan menggunakan format formulir excel pada waktu tertentu yang ditetapkan di setiap tingkatan wilayah. Pelaporan kepada tingkat yang lebih tinggi dapat memanfaatkan kelompok komunikasi melalui media sosial per jenjang wilayah atau menggunakan google form.

Proses pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dalam kegiatan vaksinasi keluarga melalui tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Proses pelaksanaan pencatatan dan pelaporan vaksinasi keluarga dapat digambarkan melalui gambar berikut :

Gambar 2

Proses Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan

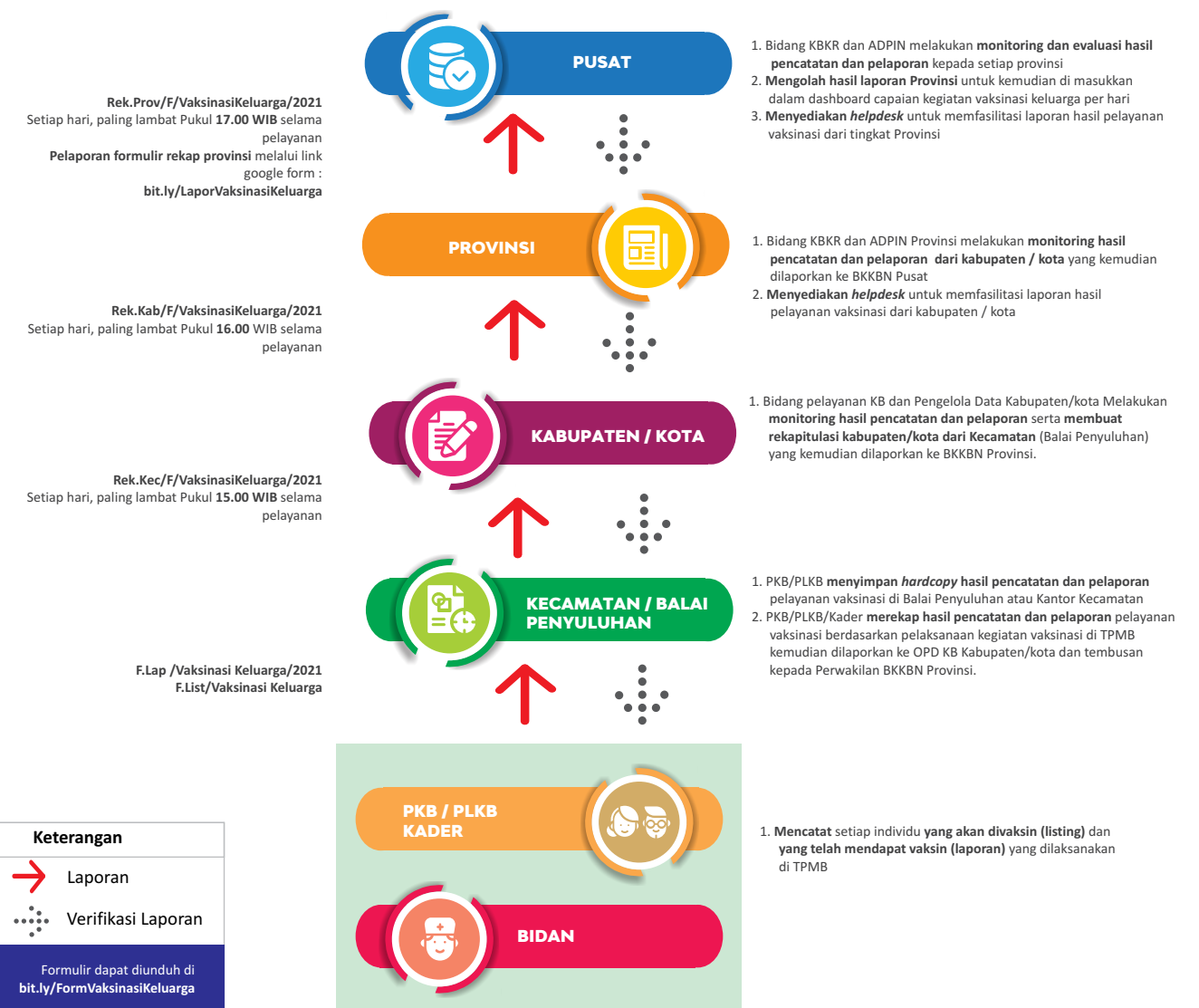


Gambar di atas menunjukkan:

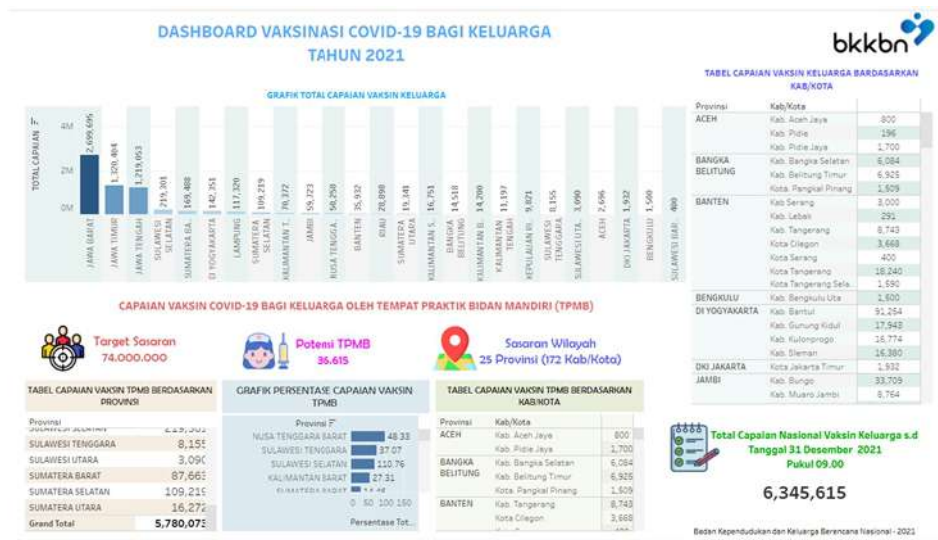
1. Persiapan dimana dalam hal ini petugas melakukan pemetaan calon peserta vaksinasi dengan menggunakan Formulir *Listing*
2. Pelaksanaan dimana dalam hal ini terdapat beberapa proses di dalamnya yaitu :
 - 1) Petugas memastikan bahwa calon peserta vaksinasi hadir dengan menyandingkan data dari Formulir *Listing* yang telah dibuat saat pemetaan
 - 2) Petugas melakukan pencatatan untuk registrasi ulang pada pelaporan P-Care (BPJS)
 - 3) Petugas memastikan peserta yang telah melalui proses *screening* saja atau *screening* dan vaksinasi, untuk dicatat melalui P-Care dan pencatatan BKKBN
3. Monev dimana dalam hal ini menjelaskan tentang Pencatatan dan pelaporan vaksinasi keluarga yang dilaporkan ke jenjang lebih tinggi (ke kecamatan atau balai penyuluhan) sesuai dengan Bagan Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan dibawah.

Gambar 3

Proses Mekanisme Pencatatan Dan Pelaporan



Pencatatan dan Pelaporan vaksinasi Keluarga dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021. Hasil capaian laporan kegiatan vaksinasi keluarga dapat dipantau setiap hari melalui *dashboard* vaksinasi keluarga yang dapat diakses melalui [link bit/ly/DashboardVaksinasi Keluarga](https://bit.ly/DashboardVaksinasiKeluarga). Sampai dengantanggal 31 Desember 2021 capaian vaksinasi keluarga oleh TPMB 5.780.073 dosis



Sumber : *dashboard* vaksinasi Covid-19 Bagi Keluarga Tahun 2021

1. Pelaksanaan Zona Integritas Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Bebas Melayani Di Unit Kerja Eselon II Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2021

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsiten dan berkelanjutan berdasarkan peraturan presiden Nomo 81 tahun 2010 tentang grand desain Reformasi Birokrasi (RB) 2010–2025, setelah adanya aturan presiden lebih lanjut diperkuat dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wiayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZIWKB dan WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Dimana Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan mencapai sasaran RB dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan RB yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) sebagai unit kerja dalam membangun ZIWKB dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dimana proses pembangunan ZI telah dilakukan dalam setiap kegiatan dan program yang ada di Ditlaptik yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penataan Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM), Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam proses pembangunan ZI WBK tersebut DITLAPTIK dapat melaksanakan program pembanguan ZI WBK sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan diantaranya :

- Internalisasi Budaya Kerja VALID (Verifikasi Amanah Loyal Inisiatif dan Disiplin)
 - Agent of Change bentuk budaya kerjanya adalah datang tepat waktu sebelum jam 8 pagi, menjaga proses selama pandemi
 - Sosialisasi ZI WBK bersamain spektorat dilingkungan DirektoratLaptik
 - Telah terbentuk Tim kerja ZI WBK
 - Menyusun rencana kerja pembangunan ZIWKB
- Sosialisasi melalui media sosial seperti IG, Youtube dan Twibond

- Internalisasi Budaya kerja dengan mengadakan rapat kompenen secara teratur
- Monev Pembangunan ZI berkelanjutan WBK dengan mengadakan rapat/laporan progress Pembangunan ZI WBK

2. PenataanTata laksana:

- Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur seperti SOP, umpan balik, analisis dan evaluasi data program KKBPK
- E-office, teknologi yang digunakan untuk mendukung kinerja Ditlaptik, seperti, SR, PK 21 pengembangan New SIGA
- Keterbukaan manajemen publik melalui CIS, adanya media komunikasi melalui pejabat pengelola dan informasi dan dokumen BKKBN

3. Penataan manajemen SDM

- Penegakan Disiplin seperti teguran melalui tulisan dan lisan melalui WA grup dan rekap kehadiran pegawai Ditlaptik
- Kinerja Individu kinerja individu dapat dipantau dan diukur melalui SKP, dan SIVIKA
- Pengembangan Kinerja Pegawai melalui Training Need Assesment (TNA) terdapat 4 orang atau 25% yang mengalami kesenjangan kompetensi, telah terdapat pegawai yang mengikuti pelatihan dan pengembangan baik eksternal maupun internal
- Perencanaan dan Kebutuhan Pegawai Melalui ABK masih terdapat kekurangan pegawai fungsional, terdapat pegawai yang lulus mengikuti open biding

4. PenguatanPengawasan

- Infrastuktur Sistem Integrasi Tim unit Pengendalian gratifikasi Ditlaptik, Sarana Pengaduan (helpdesk), penanganan konflik kepentingan nihil, kampanye anti gratifikasi melalui media sosial dan surat
- Implementasi Sistem Integritas Pengaduan masyarakat melalui whatsapp dalam hal pelaksanaan PK 21, langsung ditindak lanjuti. Telah dilakukan mitigasi masalah dan solusi manajemen data PK 21, menyediakan Whistle Blowing sebagai bentuk sistem pengawasan

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Pengelolaan Kinerja Pegawai yang mengikuti workshop SAKIP, monev Kinerja melalui Radalgram, Data kinerja dilaporkan melalui emonev.
- Keterlibatan Pimpinan Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra baik tatap muka maupun online (WAG), Perjanjian Kinerja, pencapaian kinerja melalui Radalgram dan rapat komponen

6.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Kepuasan Terhadap pelayanan Survei Mandiri Periode Januari- Juni dengan Indeks Persepsi Kualitas Pelayan 16, 50 dari 17, 80. Telah mengeluarkan maklumat pelayanan Pelayanan Publik
- Standar pelayanan sudah ditetapkan melalui Kepka BKKBN No. 98/KEP/B4/2020, telah membuat panduan-panduan seperti panduan (Panduan tatacara Pengelolaan Data Rutin, Panduan tata cara Pengelolaan Data Non Rutin, Pedoman Pelaksanaan PK 21)
- Budaya Pelayanan Prima Memberi reward kepada penerima layanan seperti ADPIN award, membuka call centre PK 21

Gambar 5

Piagam Penghargaan ZI WBK/WBBM Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2021



D. Evaluasi Kinerja

A. Review Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kedeputan Bidang ADPIN Tahun 2020–2024 merupakan bagian dari penjabaran RENSTRA BKKBN 2020–2024. Renstra tersebut memuat indikator–indikator kinerja bidang ADPIN dalam kurun waktu 5 tahun, serta penjabaran kebijakan dan strategi yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra bidang ADPIN disusun sebagai rencana kerja kedeputan Bidang ADPIN yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dimana BKKBN berkontribusi pada 2 (dua) Agenda Prioritas Nasional (PN), serta pada Renstra BKKBN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan Perka No 72 tahun 2011 yang kemudian di perbarui dengan Perban No 11 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BKKBN, Kedeputan Bidang ADPIN menjalankan fungsi pelaksanaan advokasi, pergerakan dan informasi yang meliputi penyelenggaraan kegiatan–kegiatan advokasi dan KIE, menjalin hubungan kemitraan, pembinaan dan pergerakan lini lapangan serta penyiapan data dan informasi yang didukung oleh sistem informasi manajemen berbasis smart teknologi informasi diseluruh tingkatan wilayah. Oleh karena itu, Kedeputan bidang ADPIN memposisikan diri sebagai “Mission Centre” dalam mendukung keberhasilan program Bangsa Kencana yang dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh wilayah.

Kemudian, masing–masing Direktorat (UKE II) di lingkungan Kedeputan Bidang Adpin, khususnya untuk DITLAPTIK harus dapat mendukung upaya tersebut melalui kegiatan prioritas yang di ukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana

Isu–isu strategis, potensi serta hambatan yang ada di lingkungan kedeputan bidang ADPIN menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, penetapan indikator yang harus dicapai serta anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek tersebut makaditetapkanlah Arah Kebijakan dan Strategi sebagai dasar dalam penetapan Indikator Kinerja utama, Indikator Kinerja Kegiatan, Outcome, Output, sertalnisiatif strategi yang harus dilaksanakan.

Oleh karena terja diperubahan SOTK, maka perlu dilakukan review dan revisi Renstra untuk memperbaiki pembagian indikator sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKKBN yang baru dan sejalan dengan RPJMN 2020–2024.

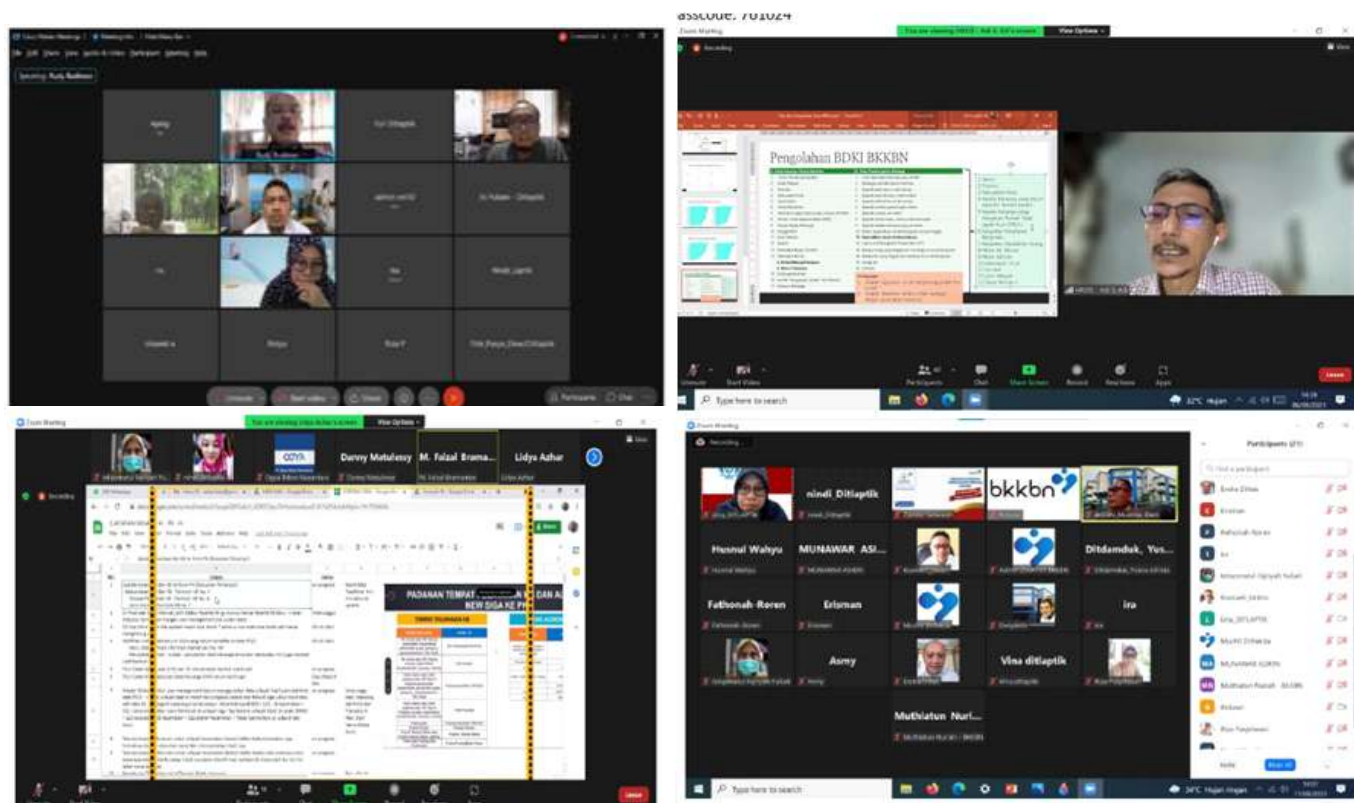
B. Review Pengelolaan Kinerja

DITLAPTIK telah melakukan berbagai paya untuk penguatan sistem kinerja sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan keseluruhan program Bangsa Kencana dan pelayanan terhadap komponen internal, eksternal dan masyarakat sebagai sasaran utama. Salah satunya dengan membangun berbagai aplikasi baik berbasis web dan mobile.

Dalam memperbaiki proses bisnis pengelolaan kinerja, DITLAPTIK telah menyusun berbagai panduan–panduan yang dihasilkan selama tahun 2021.

Selain itu, DITLAPTIK telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap tantangan pelaksanaan kinerja selama masa pandemi Covid–19. Dalam melaksanakan kegiatan, DITLAPTIK mengoptimalkan penggunaan media digital, pertemuan secara maya serta koordinasi dalam aplikasi media sosial melalui smartphone serta bekerja lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Namun demikian, dalam masa peralihan metode kerja offline menjadi online serta kondisi selama pandemi, merupakan tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia di lingkup unit kerja DITLAPTIK.

Gambar 2.21
Koordinasi Melalui Virtual Meeting



			Nilai 2019	Sementara 2020	Final 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	23.1	28.54	25.48
B	Pengukuran Kinerja	25	16.25	23.13	17.81
C	Pelaporan Kinerja	15	10.64	15	12.18
D	Evaluasi Kinerja	10	4.5	10	7
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14.79	17.92	17.08
Nilai Hasil Evaluasi		100	69.28	94.59	79.55
Tingkat Akuntabilitas Kerja			B	AA	BB

Semua penilaian hasil kinerja tahun 2020 sudah lebih baik dari tahun 2019, bahkan pada nilai sementara hampir mencapai nilai sempurna yang akhirnya dievaluasi dan mendapat nilai 79,55 (BB).

Dari hasil evaluasi SAKIP pada tabel diatas memperlihatkan bahwa:

Terdapat Kenaikan sebesar 10,27 point dari nilai tahun 2019 ke 2020, hal tersebut mengartikan bahwa Pelaksanaan SAKIP di DITLAPTIK juga mengalami perbaikan

Namun demikian perlu upaya yang harus dilakukan untuk menaikkan nilai tersebut atau minimal mempertahankan agar tidak terjadi penurunan nilai. Upaya yang harus dilakukan adalah penyusunan dokumen kinerja secara terpadu dalam satu arsip perencanaan yang meliputi Struktur Program dan Anggaran, RKAKL, RAPK, Renja dan Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

C. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DITLAPTIK melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 6 area perubahan dari 8 area perubahan sebagaimana dijelaskan pada Bab 1.

Namun demikian perlu dilakukan monitoring berkala secara intensif untuk mengetahui perkembangan pada 6 area perubahan tersebut.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi secara terus terhadap pegawai di lingkungan DITLAPTIK hingga petugas linilapangan tentang perubahan-perubahan yang dilakukan seperti implementasi logo baru, nilai organisasi, hingga menginternalisasi sebagai identitas pegawai sebagai aktor dalam lembaga. DITLAPTIK juga akan terus mengaktifkan pelaku perubahan (Agent of Change) agar menciptakan inovasi dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan perubahan-perubahan positif dan menjadi role model bagi pegawai lain.

D. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Merujuk pada surat Inspektur Utama Nomor : 1581/PW.08/C/2021, tanggal 9 Agustus 2021 kepada seluruh PTM dan PTP BKKBN Pusat dan Provinsi untuk melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BKKBN melalui Aplikasi Sistem Informasi Zona Integritas dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SIZUKA).

Implementasi SAKIP DITLAPTIK pada tahun 2020 yang diinput pada aplikasi SIZUKA sudah mengalami peningkatan di semua komponen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terlihat dari hasil penilaian terhadap implementasi SAKIP yang mendapat nilai BB pada 5 komponen SAKIP sebagai berikut:

Hasil penilaian sakip tahun 2020 lalu adalah 79.55 atau BB.

E. Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA2022

Dengan disahkannya Perka No 72 tahun 2011 yang kemudian di perbarui dengan Perban No 11 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BKKBN Kedeputan Bidang adpin termasuk dalam perubahan organisasi yang mempengaruhi perubahan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. Hal tersebut menuntut perubahan pada Renstra DITLAPTIK tahun 2020-2024. Dengan ditetapkannya tugas dan fungsi yang baru maka perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disusun di tahun 2021.

Sehingga menyikapi hal-hal tersebut diatas, DITLAPTIK telah membuat surat kepada Sekretaris Utama BKKBN terkait perubahan tugas fungsi di lingkungan unit kerja DITLAPTIK yang berdampak pada perubahan program dan kegiatan, perencanaan kebutuhan anggaran, indikator kinerja kegiatan, output serta inisiatif strategis yang harus dilaksanakan.

Upaya pemetaan kembali kinerja yang dilakukan di internal DITLAPTIK diantaranya dengan melakukan "Koordinasi intens antar Koordinator di lingkungan DITLAPTIK dan unit kerja eselon II terkait dalam merumuskan program dan kegiatan serta perencanaan kebutuhan anggaran sesuai amanat Peraturan BKKBN nomor 11 tahun 2020".

Upaya upaya perbaikan ini dilakukan dengan tujuan terciptanya keselarasan kerja baik dari sisi dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja di tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Ditlaptik Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai indikator kinerja dan perkembangan pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan pencapaian indikator kinerja tersebut membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana.

A. Kesimpulan

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hanya 1 indikator kinerja yang "belum berhasil 100%" yaitu Indeks kualitas data sebesar 99,19%.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengembangan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi program Bangga Kencana, pemanfaatan teknologi informasi supaya tersedia data dan informasi program Bangga Kencana secara cepat dan tepat waktu, koordinasi dengan para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program Bangga Kencana, serta peningkatan kompetensi para pengelola data di setiap tingkatan wilayah dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau orientasi dan bimbingan teknis.

B. Rekomendasi

1. Kendala dan permasalahan yang ada akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Terus berupaya membangun komitmen dan koordinasi dengan para pemangku kebijakan dan mitra kerja yang akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja hanya dapat tercapai dengan melibatkan para pemangku kebijakan dan mitra kerja tersebut.
3. Motivasi kerja dari pegawai Direktorat Pelaporan dan Statistik ditingkatkan.
4. Penambahan sumber daya manusia (SDM) Direktorat Pelaporan dan Statistik, khususnya yang menguasai statistik komputasi dan analisis.
5. Memonitor pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target sasaran dan waktu yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan target output yang telah ditetapkan.

Berencana Itu Keren